



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
FIT AND PROPER TEST CALON KAPOLRI
KOMJEN POL DRS. BADRODIN HAITI,
KAMIS, 16 APRIL 2015**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : III
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Fit and Proper Test
Hari, Tanggal : Kamis, 16 April 2015
Waktu : 09:56 WIB – 12:26 WIB
Tempat : R. Rapat Komisi III
Ketua Rapat : DR. HM. Azis Syamsuddin, SH.
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Budi Utami, M.Si
Acara : Fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Drs. Badrodin Haiti
Hadir : 53 Anggota dari 55 Anggota Komisi III DPR RI

JALANNYA RAPAT :

(RAPAT DIBUKA PUKUL 09:56 WIB)

(.....)

Banten 2 Nomor anggota 494, Serang Cilegon Terima kasih Pimpinan,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT :

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Terima kasih Pak Yandri. Beliau sebelumnya di Komisi II Pak. Sekarang masuk di Komisi III Sekretaris fraksi ini, ketua fraksi nya Pak Merangkap, merangkap juga pimpinan Komisi dan wakil ketua umum PAN. Bahaya ini Pak. Kemudian juga ada masuk dari fraksi partai demokrat yang itu Ibu Hajah Muniarti kemudian digantikan sementara oleh yang terhormat Saudara Sartono.

F-DEMOKRAT (SARTONO) :

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

**Yang kami hormati pimpinan Komisi III,
Rekan-rekan yang kami hormati Bapak calon Kapolri.**

Nama Sartono A-435 Dapil 7 Jawa Timur meliputi Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi dan Tengalek. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Baik, Terima kasih Pak Sartono, kemudian Bapak/Ibu sekalian. Kami dari meja pimpinan meminta persetujuan Bapak/Ibu sekalian untuk agendanya nanti adalah penyampaian visi dan misi dan paparan dari pada uji kelayakan dan kepatutan yang dimasing-masing Bapak dan Ibu telah menerima sehingga nanti dari Bapak calon Kapolri untuk bisa membaca kannya secara over light.

Kemudian nanti akan dilanjutkan dari fraksi-fraksi apabila fraksi-fraksi ingin menggunakan haknya kalau dipandang cukup tidak perlu lagi ada pendalaman saya pikir lebih cepat lebih baik tidak usah kita mendalami hal-hal yang sebenarnya sudah, sudah ada tidak ada lah.

Kalau masalah media nanti kita minta liput khusus setelah acara fit and proper kemudian apabila disepakati nanti Bapak/Ibu sekalian apabila ada tanggapan dari Saudara calon Kapolri maka kita beri kesempatan sekaligus *closing statement* dari Saudara Kapolri dan nanti apabila fraksi-fraksi telah menyatakan pendapat di dalam forum uji kelayakan dan kepatutan ini secara terbuka maka kesimpulan bisa kita tarik dan kita bisa dapat memberikan persetujuan atau tidak dapat memberikan persetujuan di dalam forum uji kelayakan dan kepatutan pada pagi hari ini. *Insyah Allah* kalau bisa disepakati ini kita bisa akhiri pukul 12 siang, kira-kira Pak Ali Umri bisa sepakat? Baik, Terima kasih Pak Ali Umri

(RAPAT SETUJU)

KETUA RAPAT :

Baik,

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,

Santai saja Pak jangan terlampau serius dan jajaran Bapak Kapolri, ini saya lihat juga penuh lengkap . menandakan full tim nya ini adalah kekompakan team work menghadapi Konfrensi Asia Afrika, dan tentu yang paling penting adalah kekompakan, team work dari pada Polri untuk menghadapi nanti kalau bisa diizinkan Pak Bapak/Ibu nanti pas setelah selesai *fit and proper* bisa mungkin Bapak/Ibu Anggota Komisi III ingin memperkenalkan atau hal-hal menyangkut daerah pemilihan.

Nah ini mumpung bisa langsung ada yang mendampingi untuk bisa, sehingga pendalaman dalam fit dan proper tidak usah terlampau cukup bisa langsung karena sudah disiapkan ini.

Baik Bapak/Ibu sekalian namun sebelum kami mulai, Bapak. Kapolri dihadapan Bapak ada surat pernyataan yang surat pertanyaan ini merupakan hasil dari pleno Komisi III. Yang dalam hal ini perlu kami sampaikan secara terbuka bahwa Saudara calon kapolri dalam hal ini menyatakan bahwa secara sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban sebagai kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta akan menolak atau tidak menerima apapun baik secara langsung maupun tidak langsung atau tidak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh siapapun dalam melaksanakan wewenang, tugas kewajiban yang diemban dan berdasarkan sumpah kepada Saudara calon Kapolri.

Surat pernyataan ini akan disaksikan oleh Bapak Ibu anggota Komisi III dan merupakan menjadi komitmen dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai kepala kepolisian negara republik Indonesia. Dan ini merupakan hasil pak, dari pada kesepakatan pleno Komisi III yang masing-masing fraksi telah memberikan masukan

dan memberikan persetujuan untuk kiranya Bapak bisa menandatangani surat pernyataan ini di hadapan Bapak/Ibu Anggota Komisi III, kira-kira sudah ada belum Pak disitu? Ada ya Pak? Kami persilakan Pak, kalau bersedia atau tidak bersedia. Kalau tidak bersedia kita skors ini Pak. Kalau bersedia kita jalan, kami silakan Pak.

CALON KAPOLRI KOMJEN POL DRS. BADRODIN HAITI :

Terima kasih Saudara Pimpinan Komisi III yang terhormat dan wakil pimpinan serta Bapak/Ibu sekalian Anggota Komisi III.

Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, Komisi III tentang komitmen yang harus saya tanda tangani sebagai satu kesepakatan antar fraksi dan di dalam rapat sebelumnya kami siap untuk menandatangani sebagai wujud komitmen kami untuk bisa, nantinya melaksanakan tugas sebagai Kapolri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih ya? sudah kesiapan dan kesanggupan dari Saudara calon Kapolri untuk memenuhi komitmen sesuai ketentuan Undang-Undang, bisa kita terima ya? Baik, terima kasih

(RAPAT SETUJU)

KETUA RAPAT :

Bapak/Ibu Bapak/Ibu sekalian untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Saudara calon Kapolri. Untuk menyampaikan visi dan misi paling waktu dan tempat kami persilakan Pak.

CALON KAPOLRI KOMJEN POL DRS. BADRODIN HAITI :

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

**Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian,
Yang terhormat Ketua Komisi III DPR RI Yang saya hormati wakil ketua Komisi III DPR RI dan seluruh anggota dewan Komisi III DPR RI yang saya muliakan.**

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanawata'ala karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada forum yang mulia ini guna menjalankan amanah Konstitusi dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri.

Pada kesempatan yang berharga ini saya aturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Bapak Ibu anggota dewan yang

terhormat atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan konsep serta pemikiran terkait dengan program dan kebijakan pada kepemimpinan saya apabila diberikan amanah menjadi Kapolri.

Anggota dewan dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan saya untuk menyampaikan visi misi dan program prioritas apabila nantinya disetujui dan dilantik menjadi Kapolri. Rumuskan visi misi dan program prioritas yang akan saya sampaikan ini didasari oleh perkembangan lingkungan strategis. Baik global, regional maupun nasional, ancaman gangguan keamanan dalam negeri dan permasalahan yang dihadapi Polri tuntutan dan harapan masyarakat, arah kebijakan pembangunan pemerintah, grand strategi Polri 2005-2024. Serta keberlanjutan program pimpinan Polri terdahulu. Prediksi ancaman untuk tahun 2015-2015.

Situasi Kamtibmas masih akan diwarnai 4 golongan jenis kejahatan dengan penonjolan pada kejahatan tertentu. Antara lain tindak pidana korupsi, Narkoba, ancaman terorisme dan gerakan ISIS. Konflik sosial konflik vertikal di Papua, memanasnya suhu politik dan aksi anarkis serta kejahatan yang meresahkan masyarakat lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas Polri selama tahun 2014 tercatat beberapa capaian positif baik di bidang pembinaan maupun operasional, adapun pencapaian pada bidang pembinaan di antaranya mendapat predikat WTP wajar tanpa pengecualian dari BPK RI atas laporan keuangan Polri.

Nilai B terkait penilaian Lakip dan reformasi birokrasi dari Kemenpan RB, dan nilai 6,69 dari KPK terkait penilaian indek periliaku anti-korupsi sedangkan pencapaian pada bidang operasional di antaranya keberhasilan dalam pengamanan pemilu legislatif, pemilu presiden wakil presiden serta KTT APEC dan terobosan kreatif dalam pedulian pelayanan publik seperti Sim Corner Namun demikian dari hasil evaluasi kinerja Polri tahun 2014 masih ditemukan beberapa kelemahan yang tergambar dalam 4 permasalahan pokok.

Yaitu pelaksanaan Tupoksi Polri yang belum maksimal, kepercayaan publik yang rendah kekerasan yang ekseusif, dan kurangnya transparansi. Dan belum optimalnya sinergitas kemitraan Polri dengan elemen masyarakat dan pemerintahan. Serta target grand strategi Polri yang tercapai secara optimal.

Permasalahan di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor pada bidang pembinaan, faktor yang mempengaruhi di antaranya kesejahteraan personel yang belum memadai masih adanya budaya negatif terutama KKN pada pembinaan sumber daya manusia Polri dan pelayanan publik. Terbatasnya almatsus dan Apalkam Polri serta sistim management Polri yang belum secara keseluruhan terintegrasi. Sedangkan di bidang operasional terdapat beberapa kelemahan di antaranya lemahnya penguasaan kemampuan fungsi teknis dan belum optimalnya kemampuan penyidikan. Kejahatan secara ilmiah,

Anggota dewan dan hadirin sekalian yang saya hormati,

Memahami permasalahan dan berbagai faktor penyebab sebagaimana telah dijelaskan di atas serta penjabaran 9 agenda prioritas nawacita ke dalam RPJMN 2015-2019 dan mengacung grand strategi Polri tahap 3, 2015-2019.

Polri telah menetapkan 10 program dalam renstra 2015-2019 slide nomor 9 dan renstra Polri 2015 2019. Polri telah menetapkan rencana kerja Polri tahun 2015 dengan 12 program prioritas selain itu Polri juga telah menjabarkan 8 program *quick wins* pemerintah yang menjadi tanggung jawab Polri.

Berdasarkan pada arah kebijakan pemerintah yang menjadi acuan bagi arah kebijakan Polri dan dihadapkan pada berbagai tantangan permasalahan tuntutan dan harapan masyarakat serta beberapa program pimpinan Polri sebelumnya maka jika diberikan kepercayaan amanah mengemban tanggungjawab sebagai Kapolri untuk periode berikutnya saya memiliki visi pemantapan soliditas dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong.

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong merupakan visi pemerintah yang harus kita wujudkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut saya telah menyusun 8 misi adalah sebagai berikut.

Satu, pemantapan soliditas melakukan reformasi dengan melakukan reformasi internal bidang SDM sarana prasarana dan anggaran.

Dua, melaksanakan revolusi mental SDM Polri melalui perbaikan sistem rekrutmen peningkatan kesejahteraan pendidikan dan latihan serta pengawasan memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dengan landasan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.

Empat, mengacu memacu terbentuknya postur Polri yang lebih dominan sebagai pelayan. Pengayom dan lindung masyarakat,

Lima, meningkatkan pelayanan yang lebih prima kepada publik

Enam, meningkatkan kemampuan deteksi untuk memahami potensi akar masalah, gangguan Kamtibmas,

Tujuh, meningkatkan kemampuan mediasi dan solusi non represif lainnya. Dalam menyelesaikan masalah sosial yang berpotensi mengganggu Kamtibmas

Delapan, meningkatkan kemampuan penegakan Hukum yang profesional terutama penyidikan ilmiah guna menekan angka 4 jenis kejahatan. Visi dan misi tersebut diimplementasikan dalam 11 program prioritas yang akan dilaksanakan oleh seluruh dalam jajaran Polri untuk mewujudkan Polri yang profesional bermoral, modern dan dipercaya masyarakat.

Adapun program prioritas tersebut meliputi satu penataan dalam pembinaan personil Polri ini merupakan penyelarasan dengan nawacita yang kedua, program

ini didasarkan pada kondisi saat ini di antaranya dampak permasalahan Polri dengan KPK. Yang mempengaruhi soliditas internal Polri. Dan pembinaan karier yang belum transparan terutama terkait dengan rekrutmen. Seleksi pendidikan pengembangan umum dan mutasi jabatan.

Pendataan dalam pembinaan personil dimaksudkan untuk membenahi manajemen pembinaan personel Polri, baik pada aspek rekrutmen pendidikan pelatihan maupun pembinaan karier guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang dapat memperkuat soliditas mengurangi ketidakpuasan internal, serta meningkatkan profesionalisme Polri. Adapun kegiatan yang akan dilakukan adalah A. Memperkuat soliditas internal melalui internalisasi pemuliaan dan kecintaan pada organisasi. Komanderwis tentang komitmen pada pelaksana tugas komunikasi terbuka antara pimpinan dengan bawahan dan implementasi pembinaan karier sistem meretrokrasi. Hal ini dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen pengelolaan organisasi yang tepat dimana seluruh subsistem yang ada di bawahnya termasuk seluruh anggotanya harus bekerja sama-sama guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga seluruh personel mempunyai kebanggaan dan kecintaan kepada Polri. Secara tulus serta ikhlas memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat.

B. Melakukan rekrutmen yang proaktif untuk menjaring calon polisi yang berkualitas disini ada 2 hal yang harus kita perbaiki yaitu sistem rekrutmen yang selama ini bersifat pasif akan kita rubah menjadi sistem rekrutmen yang lebih proaktif. Artinya polisi yang harus mencari mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi kepada pelajar, tentang rekrutmen anggota Polri dan berbagai persyaratan-persyaratan yang diperlukan dari situ kemudian bagi yang berminat untuk diberikan bimbingan diberikan penyuluhan termasuk juga diberikan pelatihan ini dimaksudkan untuk bisa menjaring anggota Polri yang berdiri berkualitas karena memang dalam sistem yang seperti itu akan didapatkan apakah integritas daripada calon-calon polisi itu bisa diketahui atau tidak. Kemudian yang kedua bisa menjangkau pada daerah-daerah yang sulit karena selama ini daerah yang sulit seperti daerah perbatasan sulit untuk mendapatkan calon-calon anggota Polri.

Oleh karena itu melalui sistem yang praktis ini akan didapatkan calon-calon anggota Polri dari daerah-daerah yang sulit sehingga nanti setelah menjadi polisi akan ditempatkan pada daerah daerah yang sempit tersebut. Kemudian yang kedua, rekrutmen tersebut akan dilakukan secara serentak rekrutmen untuk Tamtama untuk bintara dan juga untuk perwira akan dilakukan secara serentak untuk menghemat waktu biaya dan juga tenaga.

Sehingga ini juga akan mampu membuat satu efisiensi di dalam berbagai hal. Kemudian yang berikutnya seleksi pendidikan pengembangan umum Polri yang lebih transparan dan akuntabel pendidikan pengembangan umum Polri merupakan salah satu faktor pendukung pembinaan karir personil namun proses seleksi yang dilakukan saat ini kerap kali menimbulkan ketidakpuasan keluhan karena dianggap belum transparan dan akuntabel ke depan Polri melakukan langkah-langkah penyempurnaan proses seleksi pendidikan pengembangan umum melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan seleksi yang lebih transparan mensosialisasikan dan membentuk tim pengawas dengan melibatkan pihak eksternal Polri.

D. memperkuat pendidikan dan latihan serta evaluasi kurikulum untuk membentuk polisi sipil yang melindungi mengayomi dan melayani masyarakat serta anti KKN. Hal ini dilakukan dengan membentuk tim evaluasi kurikulum menyusun kurikulum di lembaga pendidikan Polri yang berbasis pada kompetensi menanamkan nilai-nilai anti KKN dan pemecahan masalah menerapkan proses pembelajaran berbasis sistem teknologi informasi menyusun dan mengimplementasikan SOP pelayanan minimal pada pelaksanaan pendidikan dan latihan

E. Menyeimbangkan proporsi anggaran melalui rekrutmen dengan prinsip minimal zero growth. Dan upaya meningkatkan anggaran belanja barang guna mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi Polri dibutuhkan strategi yang tepat untuk menyeimbangkan proporsi anggaran. Yaitu melalui rekrutmen dengan prinsip minimal *Zero growth* dan mengupayakan peningkatan anggaran belanja barang serta belanja modal secara bertahap melalui koordinasi dengan DPR, Bappenas dan Kementerian keuangan. 2 penataan kelembagaan dan meningkatkan budaya anti korupsi ini merupakan penyalarsan dengan nawacita kedua 3 dan 4.

Struktur organisasi Polri saat ini belum sepenuhnya mengimplementasikan postur mabas kecil polda cukup Polres besar dan Polsek kuat program ini bertujuan untuk menunjukkan profil kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Serta efektif dan efisien penataan kelembagaan ini juga diikuti dengan peningkatan budaya anti korupsi di internal Polri sebagai langkah nyata komitmen Polri untuk memberantas tindak pidana korupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Adapun kegiatan yang akan dilakukan adalah A. Mengevaluasi struktur organisasi tata laksana kerja terutama pada tingkat POLRES dan POLSEK karena satuan inilah yang operasional penuh dan berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari.

B. Memperkuat POLSEK perbatasan yang terfokus pada upaya pemenuhan konsumen pembangunan perkantoran, perumahan anggota tunjangan perbatasan serta dukungan sarana prasarana terutama alat transportasi dan alat komunikasi.

C. Memperkuat pengamanan kemaritiman hal ini dilakukan dengan menyatukan kepolisian perairan dan udara. Menjadi Korp porairut serta membentuk satuan kewilayahan kawasan pelabuhan laut. Untuk pengamanan pelabuhan baru yang akan dibangun pemerintah.

D. Mempercepat beroperasinya polda Papua Barat saat ini polda Papua Barat telah operasional namun masih menempati kantor pinjaman dari pemda Papua Barat serta menggunakan anggaran yang berasal dari dukungan operasional Kapolda Papua. Agar operasional penuh kantor polda dan perumans staff perlu dibangun berikut dukungan anggaran personil dan sarana prasarana secara bertahap

E. Pembentukan tim internal anti-korupsi. Tugas utama tim ini adalah melakukan pencegahan korupsi internal Polri. Dengan cara membuat aturan yang

mempersempit terjadinya peluang korupsi yaitu pelaporan LHKPN penerapan pola hidup sederhana verifikasi bisnis anggota Polri penggunaan dan pemberian barang mewah mengoptimalkan mister blower system on line.

F. Pembinaan disiplin dan penegakan Hukum terhadap personil yang bermasalah hal ini dilakukan dengan menegakkan aturan disiplin dan kode etik secara tegas dan merehabilitasi personel yang bermasalah dengan memberikan tindakan yang mendidik dan meningkatkan kemampuan mereka

G. mengintensifkan reformasi birokrasi Polri dengan melakukan evaluasi terhadap indeks tata kelola kepolisian di semua jajaran dan selanjutnya akan memberikan reward dan punishment atas hasil penilaian tersebut. Yang ketiga peningkatan profesionalisme anggota Polri. Ini merupakan penyelarasan nawacita kesatu dan dua.

Satu hal yang harus dibangun terus menerus dan konsisten adalah profesionalisme untuk meningkatkan kualitas kinerja Polri program ini didasarkan pada kenyataan banyaknya complain masyarakat akibat tindakan anggota Polri yang tidak profesional terutama dalam proses penegakan Hukum program ini dilakukan melalui kegiatan A.

Melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis provisi anggota kepolisian. Melalui lembaga sertifikasi Polri secara bertahap. Seperti misalnya penyidik kemudian penguji SIM, lalu lintas kini semua harus juga disertifikasi.

B, mengikutsertakan pendidikan pelatihan kursus seminar di dalam dan luar negeri. Kegiatan ini tidak hanya untuk para perwira tetapi juga bintanga guna menambah wawasan dan melihat best practice police

C. Meningkatkan pelatihan-pelatihan kesatuan Hal ini dilakukan untuk penggiatan dan pelibatan anggota untuk melaksanakan pelatihan di kesatuan masing-masing. Dibantu dengan instruktur di kesatuan masing-masing maupun dari SPN.

D. Rekrutmen brigadir penyidik dari S1. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan penyidik-penyidik yang berkualitas dan memang mereka berkarier khusus di bidang penyidikan.

E. Melengkapi peralatan materil khusus satuan dan perorangan dilakukan dengan menginventarisasi almatsus Polri yang sudah ada menyusun blue print dan katalog almatsus. Serta melakukan pengadaan secara bertahap.

Empat, peningkatan seakan anggauta Polri dan pemenuhan sarana prasarana khusus ini merupakan penyelarasan dengan nawacita kesatu. Program ini bertujuan untuk memberikan kesehatan anggota Polri yang dilakukan melalui kegiatan peningkatan gaji dan remunerasi, remunerasi yang diterima anggota Polri baru mencapai 33, 51 %. Dari target sehingga perlu diusulkan kepada pemerintah dan DPR untuk ditingkatkan secara bertahap. Hingga 100 %.

B. Mengikutkan seluruh anggota Polri dan keluarganya di dalam program BPJS karena hingga saat ini baru terealisasi 1,2 juta jiwa dari target 1,6 juta jiwa

C. Penambahan perumahan untuk anggota Polri saat ini buruan baru terpenuhi 14% dari seluruh personel Polri sehingga perlu ditingkatkan dari tahun ini dan seterusnya.

D. Peningkatan fasilitas dan sarana perumahan rumah sakit dilakukan dengan merenovasi dan *melengkap* i fasilitas rumah sakit Polri secara bertahap pada tahun 2015 Polri akan menambah 10 rumah sakit Polri menjadi badan layanan umum.

E. Penyesuaian tunjangan kemahalan dan pinjaman khusus perbatasan. Hal ini dikarenakan banyak anggota Polri yang bertugas di perbatasan belum memperoleh tunjangan perbatasan demikian pula anggota yang bertugas di daerah yang sulit, belum memperoleh tunjangan kemahalan.

F. pengadaan alat transportasi operasional persenjataan forensik penginderaan teknologi informasi dan komunikasi, yang dilakukan dalam rangka modernisasi Polri guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

G. Melakukan peremajaan sistim video conference dan fasilitas video conference baru di wilayah ya dengan geografis yang sulit, untuk memudahkan komando dan pengendalian.

Lima, peningkatan perlindungan warganegara untuk meningkatkan rasa aman. Ini merupakan penyelarasan dengan nawacita kesatu, empat, enam dan sembilan. Program ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengamanan atau perlindungan Polri terhadap kelompok tertentu seperti di pemukiman di lingkungan industri sehingga mempengaruhi rasa aman masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan

A. Optimalisasi penanganan konflik sosial oleh tim terpadu tingkat nasional provinsi dan Kabupaten kota dilakukan dengan mengedepankan tindakan kreatif dan preventif guna menuntaskan akar permasalahan sehingga konflik tidak terulang kembali.

B. Meningkatkan keamanan pada sektor industri perlindungan terhadap dunia usaha khususnya di kawasan industri belum optimal masih sering terjadi aksi sweeping unjuk rasa buruh yang menutup jalan atau menghalangi operasional pabrik. Pemaksaan bahkan kekerasan lainnya, upaya meningkatkan keamanan dilakukan dengan memperbanyak kehadiran anggota Polri serta melakukan penegakan Hukum yang tegas terhadap para pelaku unjuk rasa anarkis dan premanisme. Di sektor industri

C. Memperkuat perlindungan anak dan perempuan dengan memberdayakan Polwan. Pada tahun 2014 polri telah mendidik sekitar 7.000 polwan di seluruh Indonesia untuk memperkuat penanganan anak dan perempuan. Baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan. Para polwan di atas secara bertahap ditempatkan di polsek-polsek tertentu yang rawan terhadap kasus yang melibatkan

anak dan perempuan. Pada tahun 2015 Polri akan mendidik lagi sebanyak 2.150 polwan terdiri dari 50 taruni dan 2.100 brigadir.

D. Memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan dan minoritas Hal ini dilakukan dengan meningkatkan deteksi dini dan deteksi aksi implementasi Polmas penyusunan SOP di setiap polda dan melibatkan pemda, instansi terkait, FKUG MUI dan tokoh agama tokoh adat, masyarakat dan pemuda. Untuk membantu menyelesaikan akar permasalahan serta penegakan Hukum secara tegas terhadap pelanggar Hukum.

E. Memberdayakan giat deteksi dini dan deteksi aksi intelijen untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Dilakukan dengan meningkatkan pemenuhan kebutuhan personil sarana prasarana anggaran peralatan dan meningkatkan kemampuan anggota intelligent. Serta memperluas jaringan informasi yang didukung dengan teknologi selain itu dengan memperkuat kordinasi dengan komunitas intelijen dan mengefektifkan peran Babinkamtibmas untuk menyelesaikan permasalahan secara lebih dini.

F. Meningkatkan pencegahan kejahatan dan penanganan kemacetan lalu lintas dengan mengedepankan tindakan plenetif dan preventif tanpa mengurangi intensitas penegakan Hukum meningkatkan program keselamatan lalulintas meningkatkan kehadiran anggota Polri dilokasi rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Termasuk juga meningkatkan kemampuan analisis terhadap kecelakaan lalulintas.

Enam, membangun partisipasi publik dalam pengamanan lingkungan program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengamanan lingkungan baik di lingkungan tempat tinggal lingkungan sekolah atau kampus maupun lingkungan kerja. Partisipasi masyarakat tersebut harus terus dibangun melalui kegiatan

A. Pembinaan dan pemberdayaan pengamanan swakarsa. Jumlah pengamanan swakarsa sebagai kepanjangan tangan Polri dalam pengamanan cukup besar. Oleh karenanya harus dibina agar kemampuannya meningkat dan dapat diberdayakan. Untuk melakukan pengamanan di lingkungan secara lebih efektif. Disamping itu payung Hukum untuk pengamanan swakarsa juga harus diatur dengan regulasi yang lebih kuat.

B. Memberdayakan Babinkamtibmas untuk peningkatan pembinaan dan pelayanan masyarakat dilakukan melalui upaya optimalisasi dalam pemberian penyuluhan bimbingan keteladanan termasuk memudahkan pelayanan agar masyarakat lebih dekat dengan Polri.

C. Mengintensifkan pelaksanaan Polmas dalam pembinaan Kamtibmas. Dilakukan melalui intensifikasi komunikasi dan sentuhan kepada masyarakat seperti patroli dialogis sehingga aparat Polri menjadi dekat dengan masyarakat

D. Mendorong pemanfaatan alat pengamanan. Untuk membantu pengamanan lingkungan dilakukan dengan mendorong pembuatan regulasi oleh

pemerintah daerah tentang kewajiban pemasangan alat bantu pengamanan pada tempat-tempat tertentu sebagai standar pengamanan.

Tujuh, mengintensifkan sinergitas polisional dengan kementerian dan lembaga ini merupakan penyelarasan dengan nawacita kesatu, dua dan empat. Program ini dihadapkan pada kenyataan bahwa sinergitas polisional yang telah dibangun belum berjalan dengan baik oleh karenanya perlu dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan stakeholder terkait.

Kegiatan ini dilakukan melalui mengintensifkan kerjasama dengan instansi terkait di bidang keamanan seperti dengan TNI forum komunikasi pimpinan daerah komunitas intelijen daerah sebagai upaya bersama untuk menanggulangi gangguan Kamtibmas

B. Membantu Kementerian lembaga dalam upaya meningkatkan penerimaan negara terutama dengan dirjen Pajak dan bea cukai. Dan program-program prioritas pemerintah yang lain.

C. Meningkatkan Korwas dan bantuan pendidikan kepada PPNS dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas PPNS dan membantu lembaga instansi yang tidak memiliki PPNS namun diberi kewenangan untuk penyidikan. Ini juga banyak Undang-Undang yang tidak menunjuk Polri sebagai penyidik di dalam pelanggaran-pelanggaran pidana di lingkungan undang-undang itu tetapi kenyataannya mereka tidak bisa untuk melakukan penyidikan sehingga harus ditingkatkan kemampuannya untuk bisa melakukan penyidikan.

D. Meningkatkan pengawasan terhadap program pembangunan pemerintah Polri ikut membantu pengawasan jalannya program prioritas pemerintah misalnya swasembada pangan ikut mengawasi distribusi pupuk bersubsidi atau bibit agar tidak diselewengkan,

E. Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak Hukum dilakukan dengan menghilangkan hambatan birokrasi dan kemungkinan penafsiran yang berbeda

F. Memperkuat kerjasama kepolisian tingkat regional dan internasional. Terutama dengan Asianapol dan interpol dalam upaya penanganan kejahatan tran nasional demikian juga kerjasama bilateral V to V dengan negara tertentu dalam upaya peningkatan kapasitas personil pertukaran informasi dan peningkatan partisipasi Polri dalam misi perdamaian PBB. 8. Meningkatkan penegakan Hukum yang profesional obyektif dan bebas KKn ini merupakan penyelarasan dengan Nawacita keempat, tujuh dan sembilan.

Salah satu tolok Ukur keberhasilan Polri yang mudah dilihat dan menjadi perhatian masyarakat adalah bidang penegakan Hukum program di atas dilakukan melalui kegiatan A. Memperkuat kemampuan penyidikan secara ilmiah dengan membangun dan meningkatkan peran laboratorium forensik kedokteran kepolisian inaface, DVI IT dan pelibatan para pakar-pakar forensik.

B. Meningkatkan anggaran penyidikan yang saat ini baru mengcover 36,9% dari kebutuhan serta pengadaan peralatannya

C. Memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memperkuat penyidik peralatan anggaran serta meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak Hukum lainnya.

D. Mengintensifkan operasi pemberantasan terorisme dan juga pemberantasan narkoba mulai dari langkah-langkah pencegahan termasuk de radikalisasi dan penegakan Hukum secara tegas.

E. Meningkatkan penegakan Hukum pada kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seperti kejahatan jalanan perjudian ilegal logging, legal fishing dan legal mining kejahatan lingkungan, human trafficking. Cybercrime dan tindak pidana pencucian uang.

Sembilan, mempersiapkan rencana pengamanan dan bencana contingency pemilu pada serentak tahun 2015. Ini merupakan penyelarasan dengan Nawacita kesatu pemilu pada serentak sebanyak 272 kepala daerah akan dilaksanakan pada Desember 2015. Walaupun Polri telah banyak pengalaman mengamankan pemilu legislatif dan pemilu presiden namun kerawanannya amat berbeda dinamika politik lokal semakin panas gesekan antar pendukung mudah terjadi. Karena itu Polri sebagai penanggungjawab keamanan memerlukan persiapan yang lebih baik

A. Pada tahap persiapan meliputi identifikasi potensi kerawanan wilayah membuat perkiraan ancaman, menyiapkan piranti lunak menyiapkan sistem informasi atau pelaporan dan membentuk tim terpadu penanganan tindak pidana pemilu serta melaksanakan latihan pra operasi.

B. Pada tahap pelaksanaan meliputi gelar pengamanan pada setiap tahapan pilkada baik pengamanan orang barang maupun kegiatan serta penegakan Hukum bagi yang melakukan pelanggaran pidana pemilu

C. Tahap konsolidasi berupa kegiatan pengecekan personil sarana prasarana serta melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada dan juga pembuatan pelaporan. Sepuluh, penguatan pengawasan Polri. Ini merupakan penyelarasan dengan nawacita kesatu, dua dan empat.

Pengawasan merupakan elemen penting dalam management untuk menghindari adanya penyimpangan program penguatan pengawasan ini dilaksanakan melalui kegiatan

A. Memperbaiki sistem Komplin masyarakat secara online. Dilakukan melalui evaluasi sistem yang sudah ada dan menindaklanjutinya secara transparan.

B. Memperkuat kerjasama dengan pengawas eksternal baik kompolnas Ombudsman RI, Komnas HAM Komnas perempuan, KPAI, maupun Komisi III DPR RI dengan menindaklanjuti complaint masyarakat dan memberikan umpan balik atas hasil tindak lanjut yang telah dilakukan.

C. Menerapkan sistem akuntabilitas kinerja, dilakukan dengan menyusun dan mengimplementasikan SOP pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menjadikannya sebagai penilaian kinerja serta memperkuat koordinasi dengan kementerian PAN dan RB. Sebelas pelaksanaan program *quick win* Polri langkah-langkah yang dilakukan dalam percepatan implementasi *quick Win* dilakukan dengan membentuk organisasi pada tingkat mabas dan polda.

Untuk menjabarkan melaksanakan dan mengevaluasi *quick Win* setiap 3 bulan sekali adapun kegiatan yang dilakukan adalah A. Penertiban dan penegakan Hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila ini *quick Win* yang pertama. Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan memetakan kelompok radikal dan anti Pancasila melakukan upaya deteksi dini dan deteksi aksi penggalangan pembinaan dan penyuluhan terhadap kelompok radikal dan anti Pancasila. Peningkatan patroli dialogis membentuk tim pemantau dan pengawas bersama dengan kementerian lembaga terkait. Dan organisasi masyarakat dan melakukan penegakan Hukum dengan organisasi radikal dan anti Pancasila yang melakukan tindakan-tindakan anarkis. Saat ini sedang dilakukan proses identifikasi dan pemberitaan terhadap organisasi radikal dan anti Pancasila melakukan upaya patroli dialogis, tatap muka dan penggalangan terhadap para tokoh masyarakat tokoh agama adat dan pemuda.

B. *Quick win* yang kedua perburuan dan penangkapan gembong teroris Santoso dan jaringan terorisme kegiatan ini dilakukan dengan menggelar operasi Camar, yang didukung oleh BNPT dan TNI sampai dengan saat ini telah dilakukan penangkapan terhadap 18 orang anggota kelompok Santoso termasuk yang terakhir adalah Daeng Koroh. Operasi akan terus dilanjutkan sampai dengan tertangkapnya Santoso beserta jejaringnya

C. Aksi nasional pemberantasan preman dan premanisme. Kegiatan ini dilakukan dan memberikan instruksi kepala satuan wilayahnya untuk melakukan operasi pemberantasan preman dan premanisme melalui kegiatan pembinaan penegakan Hukum dan bekerjasama dengan instansi terkait hingga saat ini telah berhasil diamankan 19.000 72 orang di mana terdapat 16.425 orang dilakukan pembinaan sedangkan 2.582 orang dilakukan proses Hukum. Kegiatan ini akan terus dievaluasi dan dilakukan operasi tahap berikutnya untuk meminimalisir keberadaan preman yang dapat meresahkan masyarakat

D pembentukan dan mengefektifkan Satgas operasi Polri kontra radikal dan di radikalisasi ini khusus ditujukan untuk ISIS kegiatan ini dilakukan dengan membentuk satuan tugas operasi mendapatkan dan membedakan kelompok radikal yang menjadi pengikut atau pendukung ISIS mendapatkan pendukung ISIS sudah berangkat ke Syiria atau Irak.

Melakukan deradikalisasi dengan memanfaatkan ulama moderat dan MUI serta melakukan penegakan Hukum terhadap pengikut ISIS yang melanggar Hukum serta bekerjasama dengan BNPT, imigrasi dan instansi lainnya. Hingga saat ini telah diamankan dan diproses secara Hukum 8 orang yang terkait dengan jaringan ISIS.

E. Pemberlakuan rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri. Kegiatan ini dilakukan dengan mempersiapkan assesment centre dan assesor nya. Membentuk tim seleksi menyiapkan data pendukung berupa rekam jejak dan catatan prestasi dilaksanakan untuk jabatan strategis eselon satu dan eselon 2 untuk tingkat mabas. Dan eselon 2 dan 3 pada tingkat polda. Besar ini sedang disusun regulasi berupa draft peraturan Kapolri tentang promosi jabatan terbuka.

F. Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik. Kegiatan ini dilakukan dengan menyusun buku panduan melakukan sosialisasi dan latihan di pendidikan Polri membentuk tim penggerak di masing-masing polda serta melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan program dengan mengutamakan pelibatan polisi berseragam saat ini telah tersusun buku Saku dan pesan-pesan Kamtibmas dan malu membagi panduan anggota Polri sebagai penggerak revolusi mental di ruang publik

G. Pembentukan tim internal anti-korupsi kegiatan ini dilakukan dengan membuat aturan yang dapat mempersempit terjadinya korupsi melalui kepatuhan terhadap LHKPN yang dikaitkan dengan pembinaan karir penggunaan dan pembelian barang mewah pola hidup sederhana dan verifikasi bisnis anggota Polri serta mengoptimalkan mister blower sistem online saat ini telah dilaksanakan verifikasi bagi pejabat Polri yang wajib membuat LHKPN

H. Crashprogram pelayanan masyarakat dengan mewujudkan pelayanan bersih dari percaloan. Kegiatan ini dilakukan dengan membersihkan calo pada Centra pelayanan Polri dan memberikan sanksi apa bidang masih terdapat percaloan serta menyediakan akses partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan tentang adanya praktek percaloan saat ini telah terlaksana pembuatan pilotr proyek di polda Metro untuk melakukan pembayaran SIM secara elektronik jadi akan kita terus tingkatkan dengan pembuatan sistim online bagi perpanjangan SIM seluruh Indonesia untuk mempercepat pengimplementasian program prioritas maka ditunjuk penanggungjawab yang akan menjabarkan setiap kegiatan. Menyusun target pencapaian dan mengevaluasi implementasi program sesuai dengan tahapan anggota dewan dan hadirin yang saya hormati kesebelas program pemantapan ini akan diimplementasikan secara bertahap melalui time line yang ada dengan menentukan rencana aksi target dan evaluasi yang dibagi ke dalam 3 tahapan yaitu satu, tahap satu dilaksanakan dalam Kurun waktu 100 hari sejahat saya dilantik sebagai Kapolri tahap 2 dilaksanakan dalam Kurun waktu 6 bulan terhitung mulai bulan Juli hingga Desember 2015 tahap 3 tidak dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan terhitung mulai bulan Januari hingga Juli 2016 adapun rencana implementasi secara *lengkap* tertuang dalam naskah fit dan proper test, pemantapan soliditas dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian untuk mengukur tingkat keberhasilan program prioritas yang telah disampaikan.

Maka saya menetapkan 58 indikator keberhasilan dari masing-masing program yang dapat dinilai pada akhir masa jabatan saya. Uraian *lengkap* 58 indikator ada di dalam naskah.

Jika ke-11 program tersebut dilaksanakan dengan baik maka diharapkan akan mempeoleh keluaran yang dapat dinilai dengan terpenuhinya indikator

keberhasilan tersebut. Dari out put yang baik maka akan menghasilkan out come berupa meningkatnya soliditas sinergitas profesionalitas dan dukungan publik. Yang pada akhirnya akan menghasilkan final out come yaitu kepercayaan publik kepada Polri sebagai salah satu elemen terpenting untuk tetap berdiri tegaknya kepolisian dalam satu negara demokrasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut dengan tulus dan ikhlas saya berkomitmen akan memimpin Polri menjadi organisasi yang lebih profesional bermoral modern dan dipercaya masyarakat. Adapun komitmen saya sebagai berikut satu, menjaga integritas tidak menyalahgunakan wewenang, bertanggungjawab, bersih bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Serta menjunjung tinggi etika dan moral

Dua, soliditas melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan organisasi Polri yang sulit

Tiga, membangun sinergi polisional melakukan kordinasi dengan stake holder terkait guna memudahkan dan memperlancar program-program yang telah direncanakan dan ditetapkan

Empat, kesinambungan melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri sebelumnya

Lima, kepemimpinan yang transformatif. Menunjukkan keteladanan pemimpin yang memiliki kopetensi proaktif bernyali, tidak ragu-ragu dan bertanggungjawab serta melayani dan memberdayakan anggota

Enam, pembinaan internal menerapkan penghargaan bagi yang berprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran serta meningkatkan kesejahteraan personil Polri

Tujuh, pelayanan prima mewujudkan pelayanan prima Polri kepada masyarakat dengan lebih mudah cepat nyaman dan humanis.

Delapan, taat azas bersikap serta berperilaku sesuai dengan etika prosedur hukum dan norma-norma yang berlaku demikian pemikiran yang dapat saya sampaikan semoga dapat memberikan gambaran dan masukan bagi seluruh anggota dewan yang mulia dalam menentukan pimpinan Polri yang kita cintai semoga Allah *Subhanawata'ala* senantiasa melindungi merahmati dan meridhoi setiap langkah kita sekalian. Amien.

Sekian dan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT :

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Kalau mau diminum, minumannya silakan Pak. 2 menit dulu kasih rilek dulu Pak. Baik,

Bapak/Ibu forum rapat uji kelayakan dan kepatutan yang kami hormati dan kami banggakan,

Setelah mendengarkan paparan visi dan misi dari Saudara calon Kapolri dan telah kita dengarkan secara seksama dengan rangkaian-rangkaian yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu baik dari proses rapat pleno Komisi III kemudian dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat dengan komisi pemberantasan korupsi dan PPATK, yang telah menyampaikan di dalam forum rapat Komisi III adalah *clear* dan secara legal dapat dipertanggungjawabkan kemudian kita juga telah melakukan pengumuman kepada media cetak. Dari hasil pengumuman media cetak kami telah menerima masukan-masukan dan dari masukan-masukan itu telah di konfirmasi begitu juga dengan pihak kompolnas telah kita lakukan rapat maka dengan disampaikan paparan visi dan misi Saudara Kapolri calon Kapolri pada ini menurut hemat kami telah dapat memberikan masukan atau kesimpulan dari fraksi-fraksi ya akan kami nanti persilakan.

Sesuai kesepakatan kita di dalam pleno Komisi III. Berdasarkan hal itu, kami mengundang yang pertama untuk menggunakan hak mudah-mudahan tidak menggunakan hak, biar lebih cepat tapi kalau memang kebetul penggunaan hak juga tidak bisa larang.

Kami persilakan yang pertama sebagai pemenang pemilu karena Pak Trimedya sudah pakai baju merah ya saya juga bingung ini. Ini petugas partai pun masuk di Komisi III rupanya.

Kami Undang juru bicara dari fraksi PDI perjuangan waktu dan tempat kami persilakan.

F-PDIP (JUNIMART GIRSANG):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

Nama saya Junimart Girsang dari fraksi PDI perjuangan Kami sangat senang dan mudah-mudahan nanti ini calon Kapolri yang akan menjadi Kapolri betul-betul bisa melaksanakan nawacita yang disebut beberapa kali tadi.

Saudara komjen Badrodin Haiti calon Kapolri setelah kami mendengarkan pemaparan saudara tadi setelah memaparkan tentang permasalahan dan keberhasilan Polri. Dalam forum ini tentu kami tidak memerlukan tentang keberhasilan Polri kami hanya ingin mengetahui tentang permasalahan dan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di dalam pemaparan Saudara calon Kapolri telah menguraikan tentang permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan serta time line pencapaian program secara bertahap kalau tadi saudara calon Kapolri mengatakan tahapan 100 hari 6 bulan dan seterusnya dan yang paling menarik tentu penataan di dalam pembinaan personil.

Saudara calon kapolri kami dari fraksi PDI perjuangan tidak banyak pertanyaan tetapi kami hanya melimitasi khusus tentang patologis sosial. Penyimpangan patologis sosial penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan ini menjadi beban tanggung jawab Polri.

Yang pertama. Tentu kita semua mengetahui tentang kejahatan dengan kekerasan yang sekarang masyarakat melalui pers mengenal dengan sejumlah begal. Atau begal. Kalau orang Batak di Jawa Barat mengatakan Lembang itu Lembang. Jadi begal atau begal karena belum ada peraturan yang mengatakan harus begal Pak.

Tentu begal ini cukup meresahkan masyarakat. Pertanyaan kami tentang begal ini. Apa langkah saudara kapolri. Calon Kapolri, untuk me-minimize kejahatan ini sehingga tidak berkembang. Menjadi *free of crime* dan ada kesan Polri tidak mampu untuk menanganinya. Itu yang pertama pak calon kapolri yang kedua, tepat berkaitan dengan begal ini tentu ada hubungan dengan investor juga. Aksi premanisme kejahatan jalanan *sweeping* buruh pada lingkungan industri. Yang tentu menjadi satu permasalahan yang terkadang menghambat investasi di Indonesia.

Untuk masalah ini strategi apa yang akan saudara lakukan tetap untuk meminimize gangguan tersebut yang tentu dapat rasakan perubahannya oleh sektor industri. Sehingga para investor dapat beraktivitas dengan aman dan kondusif.

Yang ketiga kalau tapi Saudara calon Kapolri menyinggung tentang ISIS apa strategi strategi konkrit Saudara di dalam menyikapi dan mengantisipasi berkembangnya paham ISIS di Indonesia dan langkah-langkah serta upaya hukum yang akan saudara lakukan ya di dalam me-minimize keberangkatan warga negara Indonesia ke Suriah dan Irak dan atau ke tempat lain untuk bergabung dengan ISIS ini.

Yang terakhir Saudara Calon kapolri ini lagu lama tapi tetap berkumandang. Bahwa banyak dari masyarakat mungkin termasuk saya yang berpandangan bahwa Polri identik dengan KKN dan pungli.

Nah menurut saudara calon kapolri. Apa yang perlu dilakukan didalam menjawab atau membenahi tersebut saya kira dari fraksi PDI Perjuangan ada 4 pertanyaan yang konkrit dan langsung bisa dirasakan masyarakat yang tentu harus menjawab harus minta jawaban dari calon Kapolri di dalam forum fit and proper ini.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT :

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Selanjutnya saya ambil dari tengah dari fraksi Partai Amanat Nasional, kami persilakan

F-PAN (YANDRI SUSANTO) :

Terima kasih Pimpinan,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

**Ketua dan wakil ketua seluruh anggota Komisi III
Pak Saudara calon kaporli beserta jajarannya.**

Dari fraksi PAN saya Yandri Susanto menyimak dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak atau Saudara calon Kapolri tadi fraksi PAN bisa memahami dan menyetujui apa yang disampaikan oleh Saudara calon Kapolri tadi sudah sangat jelas tegas dan mantap.

Oleh karena itu fraksi PAN berpandangan pada hari ini kita bisa menyetujui atau mengambil keputusan untuk menerima Saudara komjen Badrodin Haiti ini sebagai Kapolri dan segera kita usulkan di rapat Paripurna untuk dimintai persetujuannya. Sehingga *insya Allah* dalam waktu dekat Bapak presiden bisa melantik dan kita mengakhiri tiga bulan terkahir ini Polri tidak punya pimpinan. Istilahnya ikan sepat ikan Gabus dimasukkan dalam kulkas lebih cepat lebih bagus tapi tak berkualitas.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT :

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Kalau fraksi-fraksi bisa menyamakan persepsi dan fraksi Partai Amanat Nasional saya rasa ini bisa kita selesaikan jam setengah dua belas ini. Kami Undang dari fraksi partai Hanura waktu dan tempat kami persilakan.

F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum):

Terima kasih pimpinan Saya Dossy Iskandar Prasetyo dari fraksi partai Hanura Pak Komjen Badrodin calon Kapolri yang hari ini hadir dan menyampaikan pikiran-pikiran yang sangat komprehensif dalam rangka mengemban tugas pemerintah dibidang kepolisian. Dimana tugas pemerintah di bidang kepolisian itu di rumuskan cara terukur Polri sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat .

Nah di luar itu juga tempatkan polri sebagai penegak Hukum penegak hukum punya hak diskresi ini banyak yang guyonan kalau polisi punya hak diskresi itu

tidak pakai APBN sebenarnya sudah bisa melakukan penguatan bagi tugas-tugas Polri begitu Pak.

Tapi kita tahu bahwa negara sudah memfasilitasi berbagai kebutuhan Polri walaupun di sana sini masih banyak kekurangan. Institusi polri ini adalah institusi negara yang sangat besar, tentu dibutuhkan pemimpin yang cerdas dan akhlakul karimah. Kemarin teman-teman Komisi III telah berkunjung ke kediaman Pak Badrodin dan memperoleh gambaran yang sangat jelas bahwa Bapak bersama keluarga telah menggambarkan ciri-ciri pemimpin yang akhlakul karimah.

Apalagi tadi di dalam paparan telah menyampaikan 8 komitmen yang menempatkan di depan itu menggambarkan pemimpin yang akhlakul karimah. Mudah-mudahan ini akan melekat pada sistem kepemimpinan Bapak di dalam Polri nantinya yang *insya Allah* tidak lama lagi Bapak akan dilantik sebagai Kapolri kemudian masa tugas Bapak adalah 15 bulan ini tugas Polri tidak mudah tapi dengan 15 bulan itu saya melihat Bapak sangat percaya diri untuk yakin dapat mewujudkan apa yang telah digambarkan tadi dalam visi misi maupun komitmen dan program-program yang Bapak sampaikan, Bapak sudah memberikan kisi-kisi tahapan-tahapan selama 12 bulan itu dan ini membangun kerangka keyakinan bahwa polri dibawah kepemimpinan Bapak nanti setidaknya nya akan menempatkan kerangka landasan yang cukup bagi masa depan polri Pak

Nah sebelum saya pada pertanyaan, sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya issue strategis dan kecemburuan global itu pada kebijakan pemberantasan korupsi kemudian pemeran sistem yang terpercaya dan langkah strategis untuk menekan dan menghilangkan penyimpangan internal. Nah disinilah di luar apa yang Bapak sampaikan tadi, Saya berharap atau fraksi partai Hanura berharap Bapak dapat membuat satu langkah yang spektakuler dan monumental Polri untuk Indonesia Pak.

Ini sangat penting karena pengelolaan yang berbasis konvensional seperti yang sudah di paparkan tadi. Ini tidak memberikan investasi bagi masa depan generasi muda Polri ke depan yang akan membangun Kapolri untuk Indonesia. Nah karena itu pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah peta jalan seperti apa yang Bapak persiapkan untuk menempatkan Polri sebagai garda terdepan didalam pemberantasan korupsi itu pertama.

Kemudian yang kedua agenda apa yang Bapak persiapkan untuk membenahi sistem organisasi dan personil Polri profesional sehingga bisa di percaya oleh masyarakat kemudian langkah tegas seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk menekan dan menghilangkan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang kian hari kian meningkat ini.

Demikian Pimpinan Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik. Terima kasih kami Undang dari fraksi partai Golkar

F-PG :

Terima kasih pimpinan

Bismillahirrahmanirrahim ,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

**Ketua, para wakil ketua dan anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati,
Saudara Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri berikut jajaran yang saya hormati,**

Pertama tentu kita patut bersyukur kehadiran illahi robbi Allah subhanawata'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya *alhamdulillah* proses fit dan proper test ini sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar.

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses fit dan proper ini telah berlangsung dalam beberapa hari ini dengan melakukan RDP RDP dengan instansi-instansi terkait yang sangat-sangat kompeten yang berkaitan dengan proses ini.

Memperhatikan dengan baik RDP Komisi III dengan KPK dan PPATK pada tanggal 9 April 2015 yang lalu RDP Komisi III dengan Kopolnas pada tanggal 14 April 2015 yang lalu RDP Komisi III dengan BEM UI Badan Eksekutif Mahasiswa UI pada tanggal 15 April 2015 lalu. Yang lalu menerima masukan-masukan dari beberapa pihak serta tokoh-tokoh masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan secara seksama dan sungguh-sungguh paparan dari calon Kapolri yaitu saudara Komjen Badrodin Haiti yang baru saja disampaikan secara jelas tegas dan baik.

F-PG memandang, fraksi Partai Golkar maksud kami memandang dan merasa tidak perlu untuk melakukan pendalaman terhadap visi dan misi calon Kapolri tersebut.

Oleh karena itu kami fraksi partai Golkar berpandangan dan berpendapat bahwa Saudara Komjen Badrodin Haiti memenuhi syarat untuk menjadi Kapolri dan selanjutnya fraksi partai Golkar meminta Komisi III untuk dapat menyetujui Saudara Komjen Badrudin Haiti menjadi Kapolri Ketua,

Para wakil Ketua, dan anggota Komisi III DPR serta hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan pandangan atau pendapat kami tersebut di atas maka fraksi partai Golkar juga meminta Komisi III berdasarkan kami ulangi berdasarkan pandangan dan pendapat kami tersebut di atas maka kami fraksi partai Golkar juga meminta Komisi III untuk meluruskan proses ini lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam waktu yang sesingkat singkatnya.

Ikan sepat ikan Gabus semakin cepat semakin bagus. Demikian, pandangan atau pendapat fraksi Partai Golkar lebih kurangnya kami mohon maaf terima kasih atas perhatiannya

*Wabillahi taufiq wal hidayah
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

KETUA RAPAT :

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Mudah-mudahan bisa diikuti oleh fraksi-fraksi yang lain kami Undang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Kami persilakan

F-PKB (H. IRMAWAN, S. Sosial, MM):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Yang kami hormati, Pimpinan Komisi III dan yang kami hormati Pak Badrodin Haiti selaku calon Kapolri

Saya perkenalkan nama saya Irmawan. Saya berasal dari Aceh Pak. Dari fraksi partai Kebangkitan Bangsa di dalam kesempatan ini juga saya sampaikan Poksi PKB di Komisi III ini ada 5 orang yaitu pertama adalah Pak Abdul Kadir Karding Pak Yaqut Cholil, Pak Baharudin Anshori Hajah Rohani Vanath kelima pasukan ini ditugasi untuk mendukung Bapak agar tetap dilantik menjadi Kapolri setelah kami mencermati dan mendengar paparan dari Pak Badrodin Haiti tadi secara prinsipnya kami sangat memberikan apresiasi kepada Bapak, meskipun demikian di dalam kesempatan ini ijinlah kami untuk menyampaikan beberapa hal sebagai masukan kepada Bapak Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri.

Pertama ingin kami sampaikan di dalam upaya meningkatkan kinerja kepolisian bahwa perlu kita ketahui kondisi kepolisian di daerah terutama para prajurit-prajurit polisi perlu ditingkatkan kesejahteraannya jadi oleh karena itu Bapak harus cari format bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan aparat kepolisian di daerah . Sehingga kinerja kepolisian ini akan lebih bagus Pak .

Jadi kalau selama ini ada polisi yang nakal katakanlah membeking kegiatan-kegiatan yang tidak benar adanya pungli itu salah satu faktor adalah faktor kesejahteraan Pak. Jadi secara ekonomi aparat kepolisian melakukan sesuatu hal untuk memenuhi kebutuhannya.

Jadi oleh Karena itu saya pikir harus ada kerja keras dari Kapolri baru bagaimana cara untuk bisa meningkatkan kesejahteraan polisi di daerah nantinya. Kemudian di samping itu Pak. Perlu juga pembentukan kelembagaan secara struktur. Karena sampai hari ini masih banyak daerah-daerah pemekaran yang belum diikuti pembentukan struktur kepolisian karena kebetulan saya dari Aceh saya tahu persis di Aceh itu sendiri masih ada 2. Ada 2 daerah Kabupaten yang belum ada kapolresnya Pak. Yaitu kota Subulu Salam dan Kabupaten Pidie Jaya.

Jadi Saya berharap untuk memaksimalkan kinerja kepolisian agar setiap kabupaten yang dimekarkan ini juga diikuti oleh pembentukan lembaga kepolisiannya Pak.

Kemudian selanjutnya, soal rekrutmen anggota kepolisian meskipun kita memang sudah mengetahui di dalam recruitment ini adalah bersih tidak ada pakai duit Pak. Itu kita tahu intruksi dari Kapolri tetapi yang terjadi di daerah masih banyak orang-orang atau oknum-oknum memanfaatkan situasi ini Pak. Mesti ada calo-calo liar di dalam setiap rekrutmen polisi .

Oleh karena itu dia pihak Kapolri nanti nya ketika Bapak dilantik menjadi kapolri perlu dibentuk tim khusus Pak untuk memantau dan mengawasi sehingga tidak ada masyarakat yang dikorbankan.

Kemudian selanjutnya soal radikalisme bahwa gerakan radikalisme dan teroris udah sangat meresahkan ISIS hanya salah satu contoh masih ada gerakan-gerakan radikalisme lainnya yang berkembang di masyarakat NU melalui Ketua umum PBNU Kiyai Said Agil Siat telah menegaskan gerakan radikalisme terorisme terutama agama islam adalah sangat membahayakan.

Oleh karena itu bagaimana nanti Bapak bisa membangun kerjasama dengan para ulama untuk mengantisipasi gerak radikalisme ini untuk membasminya di republik ini. Kemudian selanjutnya selanjutnya ini adalah masih banyak gerbong narkoba yang mengendalikan penjualan Narkoba di balik penjara. Seperti kasus Fredy Budiman, bagaimana langkah-langkah calon Kapolri untuk melakukan penindakan gerbong-gerbong narkoba yang lainnya yang ada di lembaga permasyarakatan serta bagaimana koordinasi kepolisian dengan lapas agar jaringan narkoba yang dikendalikan di LP ini bisa dihentikan.

Juga perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini seperti yang kita ketahui Pak, bahwa akhir-akhir ini adanya terjadi tindakan-tindakan kekerasan di Aceh. Bawa baru-baru ini pada penembakkan 2 oknum TNI dan di dalam kesempatan ini kami juga memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian terutama kepada Kapolda Aceh karena sampai hari ini telah mampu menangkap sebagian daripada pelaku penembakan ini oleh karena itu kami berharap kepada pihak kepolisian terutama dari Kapolri untuk memberikan dukungan maksimal kepada kepolisian di Aceh agar semua pelaku-pelaku penindak kekerasan di Aceh ini dengan segera dapat tertangkap Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari fraksi PKB, sekian terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT :

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Selanjutnya kami undang dari PAN luar biasa ini Baik, kami undang dari fraksi partai Nasdem.

F-NASDEM :

Baik, Terima kasih

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pimpinan yang kami hormati,

Bapak wapolri Plt. Kapolri beserta seluruh jajarannya yang hadir hari ini 40 yang di dalam saya tidak tahu berapa orang yang di luar ini hampir sama dengan anggota Komisi III hari ini.

Pertama-tama kami dari fraksi Nasdem mengucapkan selamat kepada Pak Badrodin Haiti yang hari ini telah melakukan fit and proper test. Yang menurut kami 11 program prioritas yang disampaikan tadi itu sama dengan visi misi restorasi Indonesia. karena saya yakin Pak Badrodin bisa memimpin gerakan perubahan di tubuh Polri yang tidak akan berubah nasib polri kalau bukan polri sendiri yang akan merubahnya.

Nah oleh karena itu, Pak Badrodin masa jabatan satu setengah tahun tentu tidak membuat Pak Badrodin tidak semangat untuk melaksanakan 11 program prioritas ini walaupun waktunya singkat tapi kita harapkan setelah berakhir Pak Badrodin meninggalkan kenangan bagi Polri setelah Bapak pensiun nanti.

Nah kemudian ada hal-hal yang sekarang menarik perhatian masyarakat . Yang pertama bahwa kita akan menghadapi pilkada di 272 daerah secara serta pada tanggal 9 Desember 2015 tahun ini.

Oleh karena itu tentu hampir seluruh Indonesia polisi mengamankan 272 kabupaten kota itu . Mudah-mudahan semuanya berjalan aman. Serentak rusuh 272 saya pikir agak repot juga Pak.

Nah oleh karena itu tentu ini memerlukan sebuah strategi besar untuk mengamankan proses pilkada itu nah kami mohon penjelasan dari Pak Cakapolri untuk menjelaskan dan menjamin keamanan pada pilkada yang akan datang. Yang kedua, banyak sekarang harapan masyarakat bahwa Polri itu tidak hanya melakukan penindakan . Tetapi mengedepankan pencegahan. Itu juga yang kita harapkan sebenarnya kepada KPK tidak hanya mengedepankan penindakan tetapi juga mendapatkan pencegahan daripada misalnya melakukan penegakan hukum yang terakhir atau disebut dengan ultimatum remidium.

Oleh karena itu kita mohon penjelasan dari Pak calon Kapolri menjelaskan itu sehingga tidak hanya sekedar bagaimana cara memasukkan orang ke dalam penjara tetapi bagaimana caranya orang tidak bisa masuk penjara. Mungkin itu pertanyaan kami dari Pak Badrodin dan kami harapan bahwa dengan sebentar lagi Bapak jadi Kapolri tentu suasana di tubuh Polri menjadi lebih kondusif Terima kasih,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT :

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Selanjutnya kami iundang dari fraksi partai Gerakan Indonesia Raya

F-GERINDRA :

Terima kasih Pimpinan Sidang, Sufi Dasco Ahmad dari fraksi Partai Gerindra hanya ingin menanggapi program prioritas hanya 2 poin. Yaitu yang pertama, fraksi partai Gerindra mengapresiasi program peningkatan perlindungan terhadap warga negara dimana Bapak sudah menempatkan polisi wanita pada perlindungan anak dan wanita karena pada saat ini di bagian Renakta itu biasanya ada kesan bahwa personil yang ditempatkan itu adalah personel-personel yang dibuang sementara fraksi partai Gerindra sangat konsentrasi terhadap kasus-kasus terutama pelecehan terhadap anak.

Sehingga harus ditangani oleh personel yang mempunyai kapabilitas dan komitmen yang tinggi terhadap penuntasan kasus tersebut kemudian untuk program prioritas yang kedua ada tolong ditambahkan kepada Bapak calon Kapolri, untuk program peningkatan penegakan Hukum yang profesional. Dimana di sini ada yang belum dimasukkan yaitu penegakan Hukum. Di bidang hak cipta khususnya, film dan musik yang merupakan industri kreatif ,karena di industri kreatif sudah mau mati Pak, karena banyak pembajakan dan kami mohon juga kalau memang ada terindikasi anggota Polri yang melindungi soal pembajakan tersebut dapat ditindak dengan tegas selain itu setelah mendengar penjelasan Saudara calon Kapolri yang sudah cukup jelas dan dapat kami terima dengan baik oleh karena itu maka fraksi partai Gerindra dapat menerima usulan Bapak Badrodin Haiti sebagai kepala kepolisian Republik Indonesia .

Dan harapan kami para pemimpin Badrodin Haiti sebagai Kapolri kelak dapat melakukan reformasi kepolisian serta penegakan Hukum dan pemberantasan korupsi.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT :

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Selanjutnya kami Undang dari fraksi partai Keadilan Sejahtera

F-PKS :

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Pak ketua yang saya hormati dan anggota yang saya cintai,

Calon Kapolri yang didukung dengan satu institusi yang *lengkap* yang hadir pada hari ini rasanya Pak Ketua dalam fit dan proper test calon Kapolri baru satu-satunya yang didatangi oleh seluruh jajaran institusinya.

Subhanallah, berarti ini ada satu soliditas yang ada *kelengkapan* penuh biasanya hanya 6 orang, 5 orang ini dari ujung-ujung ke ujung ada. Bintang 3 nya ada, bintang 2 nya ada, bintang 1 ada, sampai kopral di depan pun ada. Artinya ini ada ciri-ciri tanda-tanda baik Republik kita sudah lelah Pak, hampir mendekati 3 bulan atau 4 bulan tidak punya Kapolri sementara kita pengen adalah konferensi Asia Afrika. Bayangkan Pak kalau besok tanggal 20 kita siapa Kapolrinya? Nanti malu juga Pak, kita di dunia Pak. Ya pak Ketua?

Saya lihat pak ketua tadi itu, gairah nya itu gairah ingin cepat kaya gitu. Biasanya paling jago ngayun, tapi sekarang jago loncat dia tampaknya. Jadi Saya memberikan apresiasi kepada calon Kapolri dengan bahannya yang begitu *lengkap* dengan 11 prioritasnya, ya? Dan saya kemarin ketika Raker juga sudah menyampaikan Bapak sudah saya panggil sebagai Kapolri Pak Badrodin.

Karena memang tentang apa peraturan Polri yang tentang jilbab itu sangat membuat kami memberikan apresiasi besar Pak. Dan ini wajar umat biar tahu di republik ini bahwa kita mendukung Pak Badrodin.

Yang kedua Pak Ketua, kami rasanya tidak perlu lagi memberikan banyak pertanyaan Pak. Karena bahan-bahan ini pun sudah kita sudah dapatkan. Dan kita berharap bahwa sesungguhnya Komisi III hari ini bisa memutuskan Pak Badrodin sebagai calon Kapolri untuk dibawa ke Paripurna dan *insya Allah* kalau perlu Jadi kalau Pak Sudding sudah semangat begini kita senang karena dia suka bikin susah biasanya.

Jadi Pak Ketua, bukan kami tidak banyak pertanyaan. Terlalu banyak pertanyaan kepada polri sebenarnya. Tapi kita angkat dulu dia sebagai Kapolri besok baru kita selesaikan secara adat hal-hal teknis. Sebab masukan kami tentang polri begitu tebalnya Pak yang kita akan berikan masukan, dari semua jajaran, di Bareskrim nya. Di Propam nya di Lemdikpol nya, apalagi SDM nya dan sebagainya banyak nanti kita akan sampaikan tapi tetap kan dulu pak defenitif kapolri nya hari ini. dan kami PKS, mendukung, menyetujui apa yang disampaikan visi dan misi oleh Pak Badrodin dan semoga bisa dilanjutkan oleh Pimpinan Komisi III.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

KETUA RAPAT :

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Selanjutnya fraksi partai Persatuan Pembangunan

F-PPP (DRS. H. HASRUL AZWAR, MM):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua,

Ijinkan saya Arsul Sani mewakili fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan pendapat fraksi PPP, atas pengusulan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri yang akan datang. Setelah tadi mendengarkan komprehensitas paparan yang disampaikan oleh Pak Badrodin. Yang saya, ini kalau semua pejabat publik kita. Itu membuat paparan seperti Pak Badrodin maka cepat beres negara kita ini. Karena saya lihat paparannya pertama, mencakup atau posisi capaian saat ini kemudian visi misi time line pencapaian dan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini Pak yang nanti menjadi kontra Pak Badrodin dengan kami semua selama masalah jabatan Bapak .

Dari apa yang kami baca. Baik Pak buku kecil maupun buku besar. Dan tadi pagi PPP kebetulan sempat melakukan tanya jawab publik melalui radio el-shinta dan jaringannya di seluruh Indonesia dari seluruh penahannya maupun SMS-SMS yang masuk Pak. Tidak satupun pendengar yang menjadi keberatan Bapak menjadi kaporli. Atas dasar itu maka tentu kami fraksi PPP, tidak mempunyai alasan apapun untuk tidak menyetujui Pak Badrodin sebagai kaporli kita pada yang masa yang akan datang namun ada satu SMS yang masuk ke saya Pak, yang saya kira harus saya sampaikan ke Pak Badrodin.

Ini SMS nya dari tanah leluhur Bapak. Mohon disampaikan Pak Arsul kepada Pak Badrodin agar beliau bisa menjadi Kapolri. Yang setelah pensiun dikenang seperti Jenderal Hugeng. Itu saja terima kasih yang ingin kami sampaikan.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT :

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Terakhir fraksi partai Demokrat menimbang, mudah-mudah sekarang harus menentukan sikap jangan terus menimbang.

F-DEMOKRAT (DIDIK MUKRIANTO, SH, MH):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya

Yang kami hormati Pimpinan Komisi III beserta seluruh anggota Komisi III

Yang saya hormati,

Bapak Komjen Badrodin Haiti beserta seluruh jajaran kepolisian yang hadir pada kesempatan hari ini

Ijinkanlah saya Didi Mukrianto dari fraksi partai Demokrat menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda fit and proper test pada siang hari ini. Seperti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan fraksi terdahulu fraksi partai demokrat sadar betul bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Badrodin Haiti terkait dengan visi dan misi dan pemaparan di dalam agenda hari ini sudah sangat luar biasa hak dan memang yang kita harapkan sosok Kapolri ke depan adalah figur pemimpin yang berintegritas tinggi punya komitmen untuk di dalam konteks penegakan Hukum, memberikan perlindungan dana yang masuk kepada masyarakat di dalam konteks penciptaan rasa aman di masyarakat.

Nah kalau bicara itu Pak, saya pikir dengan apa yang disampaikan oleh Pak Badrodin Haiti sudah merefleksikan apa yang menjadi harapan kita semuanya menjadi seorang sosok Kapolri yang berintegritas tinggi dan memunyai komitmen utuh terkait dengan penegakan Hukum.

Namun demikian Pak kami dari fraksi partai demokrat ingin memberikan standing yang lebih kuat lagi kepada publik bahwa memang Pak Badrodin Haiti ini adalah sosok yang diidam-idamkan di dalam konteks hadir nya kapolri yang kuat dan berintegritas.

Nah untuk itu Pak perkenankanlah pada kesempatan kali ini ada beberapa hal dari fraksi partai demokrat yang ingin publik mengetahui bahwa apa yang akan dilakukan oleh Pak Badrodin Haiti kedepan betul-betul merefleksikan kinerja Kapolri di dalam konteks penguatan kelembagaan kepolisian.

Untuk itu Pak mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa Satu kita memahami betul bahwa negara Republik Indonesia ini adalah negara yang multi kultural dan multi etnik dan keberagaman itu tentunya menjadi penopang dan juga penyangga kokohnya negara Republik Indonesia ini.

Namun demikian kita juga menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ini masih sering muncul adanya konflik-konflik sosial konflik-konflik komunal yang tidak ada habis-habisnya Pak. Nah terkait dengan hal tersebut diatas, kami ingin bahwa kepolisian mendatang bisa lebih sigap bisa lebih mendeteksi lebih dini dan bisa menyelesaikan persoalan konflik komunal yang selalu hadir di tengah masyarakat.

Nah terkait dengan hal itu Pak mohon perkenan Bapak untuk bisa memberikan penjelasan kepada kita semuanya dan rakyat Indonesia ini apa langkah-langkah ke depan yang komprehensif yang akan dilakukan oleh Bapak calon Kapolri terkait dengan persoalan tersebut. Kemudian hal kedua yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Salah satu amanat reformasi 1998 kemarin Pak.

Bahwa bagaimana TNI dan Kapolri dituntut untuk menjaga netralitas dan independensinya dalam konteks kepentingan politik kami juga memahami dan tentunya seluruh jajaran kepolisian termasuk Bapak memahami bagaimana godaan-godaan atau tarikan-tarikan dalam kepentingan politik yang dilakukan oleh beberapa hal politisi atau beberapa kelompok politik yang ingin senantiasa

mengajak para perwira-perwira kepolisian maupun kepada lembaga kepolisian untuk masuk di dalam kepentingan politik itu.

Nah terkait hal tersebut Pak, tentunya kami ingin lebih tegas lagi. Mendengar dari Bapak bagaimana Bapak menghadapi dan menjaga independensi dan netralitas tersebut terhadap kepentingan-kepentingan politik itu.

Kemudian selebihnya bahwa sebagai bagian dari tugas dan tanggungjawab kepolisian yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah barang tentu kita juga harus lebih mengedepankan kedepan adalah pelayanan yang lebih prima terhadap masyarakat

Nah dalam konteks layanan prima tersebut tentunya penerjemahannya adalah bagian mana kepolisian menghadirkan sebuah layanan kepada masyarakat yang murah cepat dan hemat. Terkait dengan hal itu Pak, tentunya kami juga ingin mendengar dari Bapak bagaimana konsep ke depan Polri ini mampu menghadirkan sebuah layanan kepada masyarakat dengan basis pelayanan yang mudah murah dan cepat. Dan tentunya kita juga ada beberapa hal lagi yang dari fraksi partai demokrat ingin memohon kan penjelasan dari Bapak, Yaitu terkait dengan penambahan personel polri Pak. Kita tahu bahwa pada era pemerintahan SBY kemarin ada penambahan personel Polri yang cukup signifikan kalau tidak salah sekitar 50 ribu personel atau penambahan personel kepolisian di era itu .

Nah menghadapi persoalan-persoalan yang sekarang ini hadir di tengah bermasyarakat sebagaimana yang pernah ditanyakan, yang ditanyakan oleh para penanya terdahulu yaitu Pak terkait hadirnya rasa aman masyarakat yang saat ini juga ini masyarakat diresahkan dengan beberapa persoalan kriminalitas soal begal, kemudian adanya gelombang dari warga negara Indonesia yang masuk ISIS.

Maka kita ingin mempertanyakan atau kita ingin meminta penjelasan terkait dengan penambahan personil Polri ini Bagaimana pendayagunaannya yang efektif ke depan sehingga persoalan-persoalan yang saat ini hadir di tengah masyarakat, terkait dengan kriminalitas yang ada di masyarakat ini tertangani dengan baik. Dan yang juga tidak kalah penting bahwa kejahatan trans internasional tentunya ini juga menjadi sebuah. Perhatian yang harus menjadi prioritas bagi Polri ke depan untuk melakukan pencegahan dan melakukan penindakan pakai dengan kejahatan transnasional ini karena ini juga menjadi sebuah persoalan yang sangat besar ke pang ha ada Newmont pendidik ada Narkoba ada teroris dan ada cybercrime.

Yang ini juga menjadi ancaman buat negara kita terkait hal tersebut Pak mohon bagaimana kedepan Bapak mampu memperdaya gunakan kelembagaan kepolisian untuk menghadapi dan menindak persoalan ini dan termasuk di dalamnya bagaimana konsep kepolisian ke depan untuk membangun sinergi dan kerja sama dengan bangsa-bangsa atau negara-negara yang terkait dengan persoalan-persoalan ini.

Dan juga Pak yang terakhir mungkin ini yang kami sampaikan. Bahwa ini adalah faktung realistis yang hadir di tengah-tengah masyarakat sesekali bahwa kita dihadapkan pada persoalan bentrokan antara personil TNI dengan personel

Polri. Dan ini cukup meresahkan dan cukup mengkhawatirkan buat kami sebagai masyarakat di dalam konteks hadirnya rasa aman itu Pak .

Nah agar kejadian ini tidak terulang di kemudian hari Pak, mungkin ada baiknya Bapak menjelaskan kepada kami, terkait dengan konsep-konsep ke untuk menghindari kejadian-kejadian tersebut agar tidak terulang dan untuk menutup pandangan fraksi partai demokrat tentunya kita semua paham bagaimana kita ingin menghadirkan sebuah birokrasi yang bersih, menghadirkan pemerintah yang bebas dari korupsi dan ini saya yakin ini menjadi tugas kepolisian.

Nah terkait dalam hal itu Pak mungkin kami juga ingin memohon komitmen Bapak bagaimana kepolisian kemudian hadir di dalam peran serta mengambil pemaksaan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan kepolisian ini Pak. Karena faktanya sebagian masyarakat saat ini memang dihadapkan kepada persoalan-persoalan ketidakpercayaan atau kekurangan atau berkurangnya kepercayaan terhadap institusi kepolisian ini di dalam menangani persoalan-persoalan kepolisian.

Itu mungkin yang dapat kami sampaikan Pak, dari fraksi partai demokrat. Karena sesungguhnya kami menyadari betul, apa yang disampaikan Bapak pada saat pemaparan tadi sudah cukup bagus dan luar biasa dan memang kalau bicara sosok hadirnya kepolisian ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena sesudah 3 bulan ini kita juga terjadi kekosongan kepolisian dan saat ini saya pikir momentum yang baik untuk menghadirkan sosok kepolisian dan Bapak pada paparan hari ini sudah memberikan harapan kepada kami bagaimana sosok Kapolri kedepan yang berintegritas serta komitmen tinggi untuk melaksanakan penegakan hukum.

Nah untuk itu Pak dengan apa yang akan kami sampaikan standing partai demokrat tadi mudah-mudahan ini bisa menambah penguatan Bapak di dalam konteks kepercayaan masyarakat untuk memilih Kapolri yang definitif kedepan.

Demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan

AkhirulKalam,

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT :

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Baik Bapak Ibu sekalian forum uji kelayakan dan kepatutan pada pagi hingga siang hari ini masih menyisakan 15 menit kesepakatan kita pada pukul 12. Kami beri kesempatan kepada Saudara calon Kapolri untuk memberikan pandangan sekaligus closing statement untuk dalam forum ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bisa secara umum saja Pak tidak usah satu persatu .

CALON KAPOLRI KOMJEN POL DRS. BADRODIN HAITI :

Terima kasih

**Bapak Pimpinan dan terima kasih.
Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat,**

Atas pertanyaan masukan dan juga dukungan dan persetujuan lainnya ini merupakan satu penambah semangat kami untuk bisa memimpin Polri ke depan yang pertama saya ingin menjelaskan memang ada beberapa kasus-kasus yang menonjol di era belakangan ini terutama tadi yang ditanyakan masalah yang terkait dengan Begal Begal ini memang istilah, istilah baru di Jakarta tetapi sebetulnya di tempatnya Pak Ketua Komisi III ini sudah lama.

Istilah begal itu digunakan kalau istilah di Jakarta perampasan kendaraan bermotor. Tadi disampaikan bahwa apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri untuk bisa memberantas begal ini. Paling tidak mencegah dan memberantasnya saya sampaikan data Pak, Begal itu yang khusus perampasan kendaraan bermotor dari Januari sampai dengan Maret 2014 dibandingkan Januari sampai Maret 2015 itu sebetulnya mengalami penurunan dalam 3 bulan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu penurunannya 3,2% sedangkan penyelesaiannya itu mengalami peningkatan 14% itu datanya lengkap Pak.

Nah oleh karena itu bagaimana Polri menanggulangi ini? Saya ingin sampaikan bahwa maraknya begal ini perlu ditangani bagaimana untuk mencegah. Yang pertama kita harus lakukan pendataan dan analisis terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi waktunya kejadian, lokasinya kejadian, kemudian jam-jam lokasi rawan kemudian jumlah pelaku 3 orang, 4 orang dan seterusnya kemudian modus operandi maupun jenis motornya itu. Kita lakukan analisis sehingga kita bisa simpulkan daerah-daerah rawan mana? jam-jam rawan itu jam berapa?

Oleh karena itu upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh Polri yang pertama adalah memberikan satu penyuluhan dan bimbingan kepada Masyarakat untuk tidak menjadi korban kejahatan khususnya begal ini. Kemudian juga kita bisa memberikan kepada masyarakat itu tip-tip untuk menghindari jangan sampai menjadi korban.

Misalnya kalau misalnya melewati satu jalan yang sepi itu apa yang harus dilakukan kalau misalnya merasa ada yang membuntuti di belakangnya apa yang harus dilakukan. Itu tip-tip seperti itu bisa di berikan. Tentu di dalam upaya pencegahan yang lain adalah meningkatkan patroli. Kalau tadi sudah disampaikan agar lokasi rawanya sudah jelas lokasi rawan di daerah ini jalan ini sampai kilometer ini sampai kilo meter ini, kilo meter ini rawan ke patroli bisa dilakukan di sana baik terbuka maupun tertutup oleh anggota Polri. Tetapi juga kita juga bisa lakukan hal lain misalnya pendataan mantan-mantan begal yang sudah keluar ini juga menjadi yang menjadi perhatian kita untuk kita bisa upayakan monitor baik dilakukan pembinaan maupun di monitor di mana mereka berada. Aktivitas apa yang mereka lakukan.

Nah Kemudian yang berikutnya selain pencegahan tadi adalah penegakan Hukum ini bisa kita lakukan penegakan Hukum membal baik melalui operasi melalui raja maupun mau mulai pada tahap penyelidikan jadi kalau yang

melakukan operasi itu biasanya sudah teridentifikasi dari pengembangan jaringan yang sudah tertangkap. Itu bisa dilakukan operasi yang sifatnya represif.

Kemudian kalau misalnya melalui raja itu biasanya pada jam-jam tertentu untuk bisa menangkap orang-orang yang mungkin akan melakukan atau setelah melakukan begal ini. Nah kemudian yang berikutnya termasuk pengungkapan jaringan kalau misalnya melalui suatu penyelidikan itu biasanya satu kasus. Kita periksa saksi saksinya minta olah TKP nya kemudian kita kembangkan bisa mengarah kepada pelaku.

Nah penindakan-penindakan ini yang bisa kita lakukan, tetapi saya juga berharap kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Ini yang harus dipercayakan pada Polri. Polri akan melakukan satu proses Hukum yang sesuai dengan ketentuan Nah aturan Hukum yang berlaku ini yang terkait dengan begal Pak. Kemudian yang berikutnya terkait dengan masalah pengamanan diinvestasi. Premanisme.

Premanisme ini banyak sekali, baik secara perorangan maupun kelompok biasanya ke premanisme di perusahaan-perusahaan itu terkait dengan karyawan. Karyawan biasanya gaji setiap hari sabtu setiap hari sabtu karyawan kemudian ada preman-preman yang memalak, itu yang terjadi tetapi juga ada premanisme yang terkait dengan limbah. Limbah industri limbah pabrik yang masih mempunyai nilai ekonomis itu juga jadi kan rebutan untuk bahan bahkan untuk pemaksaan dengan alasan organisasi, alasan kumpulan di masyarakat itu.

Nah ini dijadikan satu kegiatan yang biasanya juga memaksa dan menekan industri itu Nah kemudian ada juga gangguan itu bukan dari premanisme saja tetapi karyawan yang unjuk rasa, unjuk rasa bisa saja tadi saya sampaikan adalah ada sweeping, ada pemaksaan, ada kekerasan lainnya bahkan unjuk rasa secara damai tetapi menutup akses jalan, ini yang tidak boleh terjadi kalau ini tidak dilakukan upaya maksimum oleh Kepolisian itu akan membuat investasi di negara kita juga akan semakin sulit iklim investasinya sehingga investor juga tidak mau menanamkan investasinya di Indonesia.

Oleh karena itu di dalam program prioritas kami itu termasuk bagaimana melindungi kawasan-kawasan industri. Satu yang harus kita lakukan dalam upaya pembinaan terhadap masyarakat di sekitar industri penyuluhan, bimbingan, pembinaan termasuk juga pemahaman kepada mereka tentang adanya premanisme dan pemanfaatan limbah supaya tidak dilakukan upaya-upaya dengan pemaksaan dan kekerasan. Kepada buruh juga demikian boleh saja buruh itu punya hak untuk menyampaikan pendapat, punya hak untuk mogok tetapi tidak boleh melakukan menghalangi dengan alasan solidaritas memaksa buruh yang lain untuk mogok.

Kita dengan demokrasi punya pilihan yang sama yang satu kelompok bisa yang lain bisa juga bekerja, ini harus kita lindungi.

Oleh karena itu kita harus menempatkan personil yang ada di kawasan industri berdasarkan satu deteksi dini yang cukup valid untuk bisa mengantisipasi ini sehingga tidak terjadi upaya pemaksaan, tidak terjadi upaya penutupan bahkan kita

siapkan fasilitas kendaraan bermotor yang cepat untuk bisa membantu mobilitas personil. Kalau itu terjadi tetap dilakukan penegakan hukum.

Kemudian yang berikutnya Terkait dengan masalah ISIS ya. ISIS ini merupakan kelompok radikal yang menjadi ancaman bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi bahkan dunia, negara-negara yang tidak stabil dimasuki ISIS kemudian dia berkembang menjadi satu kelompok sipil bersenjata yang cukup meresahkan masyarakat. Kita bisa lihat di negara lain seperti di Libya kemudian bahkan ini di Yaman mungkin negara beberapa negara-negara lain nah ini sudah sudah masuk mereka melakukan kegiatan bersenjata. Bahkan ini bisa dikatakan lebih berbahaya dari Al-Qaeda karena memang paham mereka itu paham takfiri artinya siapa saja baik orang muslim maupun non muslim yang tidak sepaham dengan mereka dikatakan kafir dan itu bisa di perangi oleh mereka. Ini yang- yang karena ISIS ini kan di Indonesia didukung oleh kelompok-kelompok yang pada umumnya adalah pendukung-pendukung yang pada umumnya terlibat terorisme. Oleh karena itu ISIS ini juga menjadi bagian dari ancaman negara kita.

Nah karena ISI sini adalah lebih banyak pada ideologi tidak cukup hanya untuk bisa di lakukan proses penegakan hukum semata karena yang terpengaruh itu adalah pemikirannya sehingga yang harus diperangi itu adalah pemikirannya harus di pengaruhi itu pemikirannya. Nah siapa yang bertanggung jawab ini ini juga belum ada di negara kita, seharusnya inisiatif ini dilakukan oleh BNPT untuk dengan memanfaatkan tokoh-tokoh agama mungkin dengan kerjasama dengan Kementerian Agama untuk bisa memerangi pemikiran mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang yang sudah terjangkau pemahaman yang berkaitan dengan ISIS ini.

Ini yang tidak ada. Namun demikian Polri juga punya peran, Polri berapa kali menyampaikan kepada di dalam rapat-rapat resmi bahwa Polri perlu payung hukum, perlu regulasi selama ini ISIS dilarang tetapi regulasinya tidak ada, bisa saja dibuat dengan Perpu bisa juga dengan revisi Undang Undang Anti Teror yang di cepat.

Sekarang kita tadi ada pertanyaan juga bagaimana dengan orang yang berangkat ke Suriah, orang bebas bergerak siapa saja ini tidak boleh dihalangi, kita menghalangi alasan apa, tidak ada bisa menghalangi selama dia tidak melakukan pelanggaran hukum. Tetapi kita juga melarang tidak bisa kemudian menindaknya juga tidak bisa karena memang tidak ada aturan hukum yang mengaturnya tentang itu.

Oleh karena itu yang dilakukan oleh Polri adalah mendatakan, memetakan, menghimbau kepada mereka untuk tidak berangkat ke Suriah. Tetapi di antara mereka ada kepercayaan bahwa ke Suriah ke Irak itu adalah hijrah sebelum melakukan jihad itu mereka harus hijrah dulu mungkin Pak Habib bisa hafal ayatnya masalah hijrah hijrah untuk berjihad nah itu. Ini ini.

Nah ini yang menjadi dasar mereka sulit untuk bisa dicegah. Tetapi selama ini yang dilakukan oleh Polri adalah yang kita tangkap itu ada kaitannya dan dicekal juga ada kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Bukan pelanggaran ISIS tetapi pelanggaran pidana yang lain ada pemalsuan, ada terkait terorisme, ada pendanaan yang terkait dengan terorisme dan lain sebagainya. Ini yang bisa dilakukan oleh Polri sementara undang-undang yang mengatur khusus ini tidak ada.

Bagi warga negara kita yang sudah jelas di daerah di Irak atau di Suriah itu melakukan kegiatan bersenjata kita sudah koordinasikan dengan imigrasi untuk bisa dilakukan penangkalan sehingga nanti tidak bisa masuk lagi ke Indonesia. Bapak ibu yang kami hormati bahwa yang berangkat ke Suriah berapa waktu yang lalu memang tidak mau kembali ke Indonesia. Sebagian aset mereka sudah dijual sehingga waktu dikembalikan ke Indonesia oleh pemerintah Turki kita tempatkan di Pondok Sosial di Cipayung untuk bisa di upayakan dengan pemerintah daerah setempat untuk bisa menampung mereka karena aset-asetnya sudah dijual.

Ini yang terkait dengan ISIS kita bisa menggunakan shock power, kita menggunakan hard power, hard power ini artinya penegakan hukum. Tapi yang soft power ini yang tentu paling penting bagi kami adalah bagaimana mempengaruhi pemikiran mereka karena ini yang diserang adalah pemikirannya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terkait dengan pembenahan Polri di internal Polri karena Polri tadi identik dengan KKN dan pungli. Kita tidak menolak bahwa pungli masih terjadi di internal Polri, apa yang dinamakan petty corruption itu masih terjadi karena itu tadi saya sampaikan bahwa keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Polri walaupun itu tidak menjadi satu excuse bagi kami tetap korupsi adalah korupsi dan itu adalah pelanggaran hukum tetapi itu masih terjadi oleh karena itu tadi saya sampaikan ada beberapa program-program termasuk tim penertib internal.

Kita akan membentuk tim penertib internal itu untuk melakukan upaya, upayanya adalah untuk mencegah jangan sampai kasus korupsi ini juga berkembang di institusi Polri. Kalau misalnya kita bisa menghilangkan itu syukur mengurangi itu akan akan kita lakukan.

Kemudian korupsi itu seringkali karena ada sistemnya di dalam prosedur kerja kita itu yang masih ada lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi. Oleh karena itu perbaikan sistem itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk mencegah korupsi secara keseluruhan artinya seterusnya ini bisa dipakai.

Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan pengawasan, pengawasan tidak cukup hanya dari internal kita, bisa pengawasan itu melibatkan pengawas eksternal. Kemudian yang ketiga bisa kita di dalam pelayanan-pelayanan Polri kita hindari adanya pertemuan antara pelanggan masyarakat dengan Polri.

Sehingga akan mengurangi ini juga peluang-peluang korupsi. Oleh karena itu kita upayakan kalau anggarannya cukup kita upayakan dengan menggunakan sistem yang online. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ke depan juga akan bangun sistem perpanjangan SIM itu yang online jadi tidak perlu pimpinan Komisi III misalnya Ketua Komisi III harus memperpanjang SIM harus pulang ke daerahnya dimana SIM-nya.

Nah ini kita akan, kita akan lakukan untuk bisa mempermudah pelayanan mempermudah pelayanan pada masyarakat. Dan yang terakhir yang tentu ini tadi agak tidak kita hindari kalau memang sudah kita berikan sosialisasi kita berikan arahan tetapi masih terjadi ya kita harus lakukan tindakan sesuai ketentuan hukum. Ini yang harus kita kita lakukan. Kemudian

KETUA RAPAT :

Pak Saudara Calon karena waktu 12 lewat 4. Kalau masih panjang saya harus perpanjang waktu dulu saya perpanjang 15 menit ya.

CALON KAPOLRI KOMJEN POL DRS. BADRODIN HAITI :

15 menit ini siap Pak.

KETUA RAPAT:

Kita perpanjang sampai 12:15.

CALON KAPOLRI KOMJEN POL DRS. BADRODIN HAITI :

Terima kasih Pak. Saya agak, kami akan melanjutkan Pak yang berkait dengan masalah tadi ada permintaan pembuatan Polres pada daerah otonomi baru.

Tentu ini merupakan satu usulan yang bagus tetapi saya sadar bahwa pembentukan satu Polres itu memerlukan satu biaya yang cukup besar. Kita tidak hanya membangun misalnya membangun gedung personilnya tetapi harus ada perlengkapannya, harus ada biaya operasional setiap tahun sehingga ini yang menjadi pemikiran kita sehingga tidak harus semua daerah otonomi baru itu secara otomatis nanti kita bangun polresnya oleh karena itu pertimbangan anggaran ini yang sangat kami hitung karena anggaran Polri tahun 2014 itu strukturnya 67% itu untuk belanja pegawai, 22% itu belanja barang, dan 11% itu belanja modal.

Jadi belanja modalnya itu hanya 11% saja. Jadi tidak banyak untuk bisa membangun satu Polres baru. Nah ini yang yang perlu saya sampaikan. Kemudian masalah calo sudah ada programnya Pak, sudah ada program pelayanan Polri bebas calo ini yang kami akan kita lakukan operasi dan kita juga melibatkan pengawasan dari pihak luar untuk bisa mendeteksi adanya calo ini kalau masih terjadi nanti mungkin setelah 100 hari kalau masih terjadi ada pencaloan disitu tentu akan kita lakukan penindakan secara tegas siapa yang terlibat di sana. Kemudian yang masalah narkoba yang terkait dengan bagaimana peredaran narkoba dikendalikan dari Lapas.

Nah tentu ini bagian informasi ini bisa banyak kita-kita bisa dapatkan melalui jaringan-jaringan maupun informasi masyarakat dan itu masih terjadi kalau itu terjadi tentu kita lakukan upaya-upaya penegakan hukum dan proses hukum sampai ke tingkat peradilan. Namun demikian yang harus menjadi titik berat itu bagaimana misalnya memperketat pengawasan di Lapas ini bukan bagian dari domain Polri tetapi kalau Polri diminta untuk bisa membantu pengawasan di sana tentu kita bisa berikan bantuan.

Ini yang yang terkait dengan narkoba. Kemudian yang terkait dengan bentrok antara TNI dan Polri bentrok antara, gesekan bukan bentrok saja tapi gesekan antara anggota TNI dan Polri ini memang selalu terjadi dan itu tidak akan

bisa saja latar belakangnya bermacam-macam Pak bisa karena masalah-masalah yang terkait dengan perebutan ekonomi yang terkait ekonomi bisa terkait dengan perempuan, bisa terkait dengan masalah harga diri sehingga ini menjadi gesekan menjadi bibir konflik tetapi yang harus kita tekankan pada saat satuan-satuan baik Polri maupun TNI sepanjang pimpinan yang di atasnya tidak terlibat artinya tingkat Danton, tingkatnya Kanit itu tidak terlibat ini mudah untuk bisa diselesaikan dan tidak akan meluas tetapi kalau sudah perwiranya juga terlibat ini juga akan sulit.

Upaya yang dilakukan apa yang harus dilakukan adalah pertama bagaimana meningkatkan hubungan kerjasama dan komunikasi antar satuan TNI dan Polri. Kalau di satu tempat ada Polres, ada Batalyon, ada Kodim bagaimana komunikasi itu bisa dibangun mungkin ada pertemuan-pertemuan yang rutin tidak hanya pada level pimpinannya saja tetapi juga pada level anggota ini Pak. Nah kemudian yang kedua tentu harus ada kita bisa menciptakan satu program sosial program sosial atau apa saja yang bisa dikerjakan secara bersama misalnya kerja bakti dan lain sebagainya.

Demikian juga di dalam kesatuan-kesatuan itu ada namanya jam pimpinan. Nah jam pimpinan itu bagaimana pimpinan memberikan arahan kepada anggotanya pada momen-momen tertentu. Nah ini supaya diberikan pemahaman terhadap mereka bahwa misi TNI, misi Polri itu sama ada kepentingan yang lebih besar yang harus dijelaskan kepada mereka yang harus kita komit semuanya untuk melaksanakan itu.

Nah ini yang yang seringkali tidak, tidak dipahami hanya sekedar kepentingan perorangan, kepentingan segelintir kelompok ini yang sering-sering menjadi gesekan nah kemudian berikutnya dalam, dalam pertemuan-pertemuan itu bisa tidak hanya pada formal saja tetapi juga pada saat ada hiburan, pada saat olahraga, pada saat kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya rekreasi itu bisa digabung sehingga ada keakraban di antara mereka antara anggota TNI dan anggota Polri.

Yang terakhir itu tentu adalah perbaikan kesejahteraan anggota TNI dan anggota Polri kalau misalnya Polri dilihat lebih sejahtera yang barangkali dibagi sedikit. Nah itu juga bagian dari upaya untuk menjaga hubungan-hubungan baik gitu karena kecemburuan itu yang sering juga menjadi faktor pemicu tidak terucapkan tetapi itu mungkin bisa dirasakan.

Terkait masalah yang masalah konflik sosial. Konflik sosial ini sumbernya cukup banyak Pak *alhamdulillah* tahun 2014 bisa menurun karena mungkin karena kesibukan pemilu sehingga konflik sosial ini terjadi penurunan. Tetap kalau sekarang mungkin sibuk cari batu. Tetapi saya saya saya memprediksi bahwa konflik sosial ini akan akan marak tahun ini karena faktor-faktor ekonomi juga menurun mungkin harga-harga naik nah ini juga harus kita waspadai konflik-konflik yang seperti ini.

Oleh karena itu kita siapkan tadi bagian dari program prioritas kami sudah ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sudah ada peraturan pemerintah sampai dengan peraturan Kapolri juga sudah ada.

Sudah dibentuk dari Undang Undang Nomor 7 tahun 2012 itu sudah dibentuk tim terpadu penanganan konflik baik tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Harapannya sebetulnya tim inilah yang sebetulnya melakukan upaya pencegahan sejak awal. Nah oleh karena itu kendala di lapangan yang dihadapi sekarang adalah tim ini seringkali tidak ada biayanya karena pemerintah daerah selama ini ada yang menganggap bahwa urusan keamanan bukan urusan yang dilimpahkan ke daerah.

Nah sehingga ada kepala daerah yang beranggapan ini bukan urusan saya ini urusan pemerintah pusat sehingga tidak mau menganggarkan yang terkait dengan penanganan konflik ini. Padahal di dalam undang undang itu sudah jelas ada Undang Undang nomor 7 tahun 2012 kemudian juga ada PP-nya kemudian juga ada peraturan Kapolrinya. Kalau itu bisa berjalan efektif secara sinergi saya pikir konflik itu bisa dicegah dari awal tetapi kalau sudah terjadi konflik itu sudah terbuka tentu Polri harus melokalisir dan harus menghentikan konflik itu dengan segera.

Ini sudah ada rencana aksinya termasuk upaya perkuatan dari TNI. Itu sudah ada protap-protapnya yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan netralitas Polri dalam kegiatan politik. Netralitas Polri berarti Polri di dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 Pasal 28 ayat (1) Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis.

Netralitas Polri bukan hanya harapan dari civil society tetapi juga harapan seluruh bangsa. Netral artinya tidak memihak oleh karena itu jabarannya perinciannya bahwa tidak boleh anggota Polri terlibat dalam politik praktis misalnya kampanye, misalnya ada pertemuan-pertemuan partai politik.

Kemudian yang kedua dalam memberikan pelayanan dan pengamanan yang dilakukan oleh Polri tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Kemudian yang ketiga tidak mengizinkan fasilitas dinas atau fasilitas pribadi anggota Polri digunakan untuk kepentingan partai politik.

Yang terakhir tidak menggunakan hak pilih dan hak untuk dipilih juga kalau anggota Polri menjadi pada jabatan sipil tentu harus mengundurkan diri. Ini jabaran-jabaran itu kita sudah lakukan sudah buat surat edarannya kepada seluruh anggota Polri dan pengawasannya juga sudah cukup baik sehingga harapannya ini bisa terimplementasikan di wilayah.

KETUA RAPAT:

Bisa. Cukup Pak Kapolri?

CALON KAPOLRI KOMJEN POL DRS. BADRODIN HAITI :

Saya pikir sudah-sudah cukup semua mungkin kalau memang ada yang belum belum terjawab nanti bisa di kami susulkan.

Demikian penjelasan saya masalah beberapa pertanyaan tadi yang diajukan dan saya menyampaikan terimakasih atas dukungan atas yang tadi sudah menyampaikan beberapa persetujuannya sehingga akan memudahkan untuk memimpin Polri saya ke depan, sehingga bertambah semangat dan saya berkomitmen bahwa Polri ini harus berubah karena tuntutan perubahan ini bukan hanya dari saya tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, termasuk anggota Dewan yang terhormat, mengharapkan suatu perubahan di lingkungan Polri kearah yang lebih baik.

Saya memohon dukungan bahwa dengan program-program yang saya lakukan yang akan saya lakukan ini diharapkan ada perubahan yang lebih baik sehingga Polri ke depan menjadi lebih dipercaya oleh masyarakat.

Sekian dan terima kasih.

*Billahitaufig Walhidayah,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh .*

KETUA RAPAT:

Wallaikumsallam warrahmatullaahi wabarakatuh.

Baik bapak ibu sekalian forum rapat uji kelayakan dan kepatutan pada hari ini, sebelum kami akhiri kami minta kepada Bapak Calon Kapolri untuk menandatangani surat pernyataan dihadapan bapak Ibu.

Anggota Komisi III kami minta perwakilan fraksi-fraksi satu fraksi satu untuk ikut menyaksikan disertai para pimpinan untuk menyaksikan penandatanganan surat pernyataan.

Bapak ibu anggota Komisi III dan forum uji kelayakan dan kepatutan yang kami hormati.

Telah kita dengar bersama dan telah kita saksikan bersama surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saudara Calon Kapolri maka berdasarkan alur yang telah kita lihat bersama saya meminta persetujuan bapak ibu forum rapat Komisi III apabila ini bisa disepakati secara aklamasi maka kami dari meja pimpinan untuk bisa dapat langsung memberikan persetujuan terhadap saudara, sebentar sabar lah dikit apakah terhadap Saudara Calon Kapolri Drs. Badrodin Haiti dapat kita setujui dalam forum uji kelayakan dan kepatutan ini secara aklamasi? Tidak ada yang protes ya baik.

(RAPAT: SETUJU)

Baik

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati

Dengan telah diberikannya persetujuan dalam forum kelayakan dan kepatutan secara aklamasi dari 10 fraksi yang telah memberikan pandangan dan telah disetujui oleh seluruh 55 anggota Komisi III DPR RI.

Maka dengan ini Komisi III mengucapkan selamat kepada Calon Kapolri Badrodin Haiti dan Komisi III akan segera mengirimkan surat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera melakukan Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Paripurna yang terdekat mudah-mudahan dapat diselenggarakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Jadi kepada bapak ibu sekalian untuk tidak meninggalkan Gedung DPR mudah-mudahan Rapat Paripurna bisa kita selenggarakan pada sore hari ini. Sebelum kami tutup mungkin ada kata akhir dari Bapak Calon Kapolri waktu dan tempat kami persilakan Pak.

CALON KAPOLRI KOMJEN POL DRS. BADRODIN HAITI :

Terima kasih bapak pimpinan saya selaku calon Kapolri menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak ibu sekalian, yang telah memberikan persetujuan kepada kami selaku Kapolri nantinya dan tentu ini merupakan suatu tugas yang berat yang harus saya laksanakan ke depan untuk bisa mengemban amanah ini dengan baik.

Saya juga berharap bahwa Komisi III juga merupakan mitra Polri yang melakukan pengawasan terhadap Polri untuk bisa juga memberikan masukan-masukan demi perbaikan Polri ke depan. Sekian dan terima kasih sekali lagi saya beserta seluruh jajaran menyampaikan terima kasih pada seluruh bapak ibu anggota Komisi III yang kami hormati.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

**Bapak, ibu anggota Komisi III dan Saudara Calon Kapolri beserta seluruh jajaran,
Rekan-rekan wartawan dan para hadirin hadirat yang berbahagia.**

Dengan berakhirnya uji kelayakan dan kepatutan pada hari ini kami ucapkan terima kasih dan atas nama pimpinan memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam proses rangkaian uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI. Demikian kami akhiri,

*Usikum wanafsi bitaqwallah,
Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh .*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12:26 WIB)

Jakarta, 16 April 2015
Kabag Set Komisi III DPR RI

Dra. Tri Budi Utami, M.Si